



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keselarasan kebijakan pembangunan kependudukan antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat, serta mendukung integrasi pembangunan menuju Indonesia Emas, perlu adanya pedoman pelaksanaan pembangunan kependudukan di Daerah;

b. bahwa berdasarkan Grand Design Pembangunan Kependudukan di Daerah, Pemerintah Daerah wajib menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan perencanaan kependudukan untuk jangka waktu 5 (lima), perlu disusun Peta Jalan Pembangunan Kependudukan di Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Daerah Tahun 2025 – 2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten

KABUPATEN BOALEMO	KEPENGKOTABAHARAN	KEPENGKOTABAHARAN	KEPENGKOTABAHARAN	KEPENGKOTABAHARAN

- Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
 6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH TAHUN 2025 – 2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Peta Jalan Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat PJPK adalah arah kebijakan pengendalian pembangunan kependudukan di Daerah Tahun 2025 – 2029 yang dituangkan dalam program lima tahunan pembangunan kependudukan.

KABAG HUKUM	DINAS KEMAS KANTOR	ASST	SEKDA	WABUP
				

2. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
3. Penduduk adalah warga Daerah dan orang asing yang bertempat tinggal di Daerah.
4. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
5. Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.
6. Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
8. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
9. Keluarga adalah unit kecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
10. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang dalam lingkungan yang sehat.
11. Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
12. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan dan mengatur kehamilan, melalui promosi,

KAMAG HUSUM	DINASISDAK KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak - hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

13. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
14. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau agregat hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
15. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk serta pelaporan peristiwa kependudukan.
16. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
17. Nomor Induk Kependudukan, disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik, tunggal, dan melekat pada seseorang.
18. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik - materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.
19. Persebaran penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
20. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
21. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
22. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antar perkembangan kependudukan dengan daya alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang.
23. Daya Dukung Alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta seluruh unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan.
24. Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan penduduk.

KABAG HUKUM	DINAS BADA KATOK	ASSI	SEKDA	WABUP
				

25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
26. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang menjadi arah pembangunan jangka panjang daerah.
27. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
28. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
29. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
30. Bupati adalah Bupati Boalemo.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman terhadap strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan yang berwawasan kependudukan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menetapkan pelaksanaan pembangunan kependudukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan diseluruh sektor pembangunan Daerah;
- b. menetapkan kelembagaan dan koordinasi antar Perangkat Daerah dalam pengelolaan kebijakan kependudukan;
- c. menetapkan kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan di Daerah dan kebijakan sektoral; dan
- d. menetapkan kesiimbangan antara pertumbuhan penduduk, daya dukung lingkungan, serta ketersediaan sumber daya alam dan ekonomi lokal.

Pasal 4

- (1) PJPK Daerah Tahun 2025 – 2029 disusun dalam bentuk dokumen dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II SASARAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN;
 - c. BAB III RENCANA AKSI; dan

KABAG PELUKUM	DINAS KANTON	ASSI	SEKDA	WABUP
				

d. BAB IV PENUTUP.

- (2) Dokumen PJPK Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan PJPK Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Tim Koordinasi Pelaksanaan PJPK Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Keanggotaan Tim Koordinasi Pelaksanaan PJPK Daerah Tahun 2025-2029 terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dari Perangkat Daerah terkait dan lembaga nonpemerintah terkait.
- (4) Tim Koordinasi Pelaksanaan PJPK Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

pada tanggal 19 Mei 2026

BUPATI BOALEMO

RUM PAGAU

Diundangkan di Tilamuta

pada tanggal 19 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2026 NOMOR 5



Peta Jalan Pembangunan **Kependudukan**

**PJK Kabupaten Boalemo
2025-2029**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO
2025**

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN PPJK

KABUPATEN BOALEMO 2025-2029

PETA JALAN

PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

PPJK KABUPATEN BOALEMO 2025-2029



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

2025

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keselarasan kebijakan pembangunan kependudukan antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat, serta mendukung integrasi pembangunan menuju Indonesia Emas, perlu adanya pedoman pelaksanaan pembangunan kependudukan di Daerah;

b. bahwa berdasarkan Grand Design Pembangunan Kependudukan di Daerah, Pemerintah Daerah wajib menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan perencanaan kependudukan untuk jangka waktu 5 (lima), perlu disusun Peta Jalan Pembangunan Kependudukan di Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Daerah Tahun 2025 – 2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

KABAG HUKUM	DINAS/DAIRAH KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH TAHUN 2025 – 2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Peta Jalan Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat PJPk adalah arah kebijakan pengendalian pembangunan kependudukan di Daerah Tahun 2025 – 2029 yang dituangkan dalam program lima tahunan pembangunan kependudukan.
2. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan

KABAG HUKUM	DINASDAK KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

- kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
3. Penduduk adalah warga Daerah dan orang asing yang bertempat tinggal di Daerah.
 4. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
 5. Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.
 6. Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
 7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
 8. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
 9. Keluarga adalah unit kecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
 10. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang dalam lingkungan yang sehat.
 11. Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 12. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan dan mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak - hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

KABAG HUKUM	DINAS/DAIRAH KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

13. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
14. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau agregat hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
15. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk serta pelaporan peristiwa kependudukan.
16. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
17. Nomor Induk Kependudukan, disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik, tunggal, dan melekat pada seseorang.
18. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik - materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.
19. Persebaran penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
20. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
21. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
22. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antar perkembangan kependudukan dengan daya alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang.
23. Daya Dukung Alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta seluruh unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan.
24. Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan penduduk.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

KABAG HUKUM	DINAS/SEKSI KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

26. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang menjadi arah pembangunan jangka panjang daerah.
27. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
28. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
29. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
30. Bupati adalah Bupati Boalemo.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman terhadap strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan yang berwawasan kependudukan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

1. menetapkan pelaksanaan pembangunan kependudukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan diseluruh sektor pembangunan Daerah;
2. menetapkan kelembagaan dan koordinasi antar Perangkat Daerah dalam pengelolaan kebijakan kependudukan;
3. menetapkan kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan di Daerah dan kebijakan sektoral; dan
4. menetapkan kesiimbangan antara pertumbuhan penduduk, daya dukung lingkungan, serta ketersediaan sumber daya alam dan ekonomi lokal.

Pasal 4

1. PJPK Daerah Tahun 2025 – 2029 disusun dalam bentuk dokumen dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II SASARAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN;
 - c. BAB III RENCANA AKSI; dan
 - d. BAB IV PENUTUP.

KABUPATEN BOALEMO	KEPENGABDIAN KANTOR	ASE	SEKDA	WABUP
				

2. Dokumen PJPK Daerah Tahun 2025 – 2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

1. Bupati membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan PJPK Daerah Tahun 2025 – 2029.
2. Tim Koordinasi Pelaksanaan PJPK Daerah Tahun 2025–2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
3. Keanggotaan Tim Koordinasi Pelaksanaan PJPK Daerah Tahun 2025 – 2029 terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dari Perangkat Daerah terkait dan lembaga nonpemerintah terkait.
4. Tim Koordinasi Pelaksanaan PJPK Daerah Tahun 2025–2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

pada tanggal 13 mei 2026

BUPATI BOALEMO,

FRUM PAGAU

Diundangkan di Tilamuta

pada tanggal 13 mei 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO

MURDIN

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2026 NOMOR 5)

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Kabupaten Boalemo Tahun 2025–2029 ini dapat disusun dengan baik. Dokumen ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Boalemo dalam mewujudkan arah pembangunan kependudukan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan visi pembangunan daerah dan nasional.

Pembangunan kependudukan memiliki peran strategis dalam menentukan arah kemajuan daerah. Tantangan utama seperti pertumbuhan penduduk, pemerataan distribusi penduduk, kualitas sumber daya manusia, serta ketahanan keluarga menjadi fokus utama dalam PJPK ini. Dengan adanya peta jalan ini, diharapkan setiap pemangku kepentingan memiliki pedoman yang jelas untuk mengintegrasikan kebijakan dan program kependudukan secara lintas sektor di Kabupaten Boalemo.

Dokumen ini juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya pada pilar peningkatan kualitas hidup manusia dan pengurangan kesenjangan sosial. PJPK Kabupaten Boalemo 2025–2029 disusun berdasarkan data dan analisis kondisi kependudukan terkini yang bersumber dari Kabupaten Boalemo dalam Angka 2025 dan Provinsi Gorontalo dalam Angka 2025, serta melalui proses konsultasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk BKKBN Provinsi Gorontalo, BPS, dan perangkat daerah.

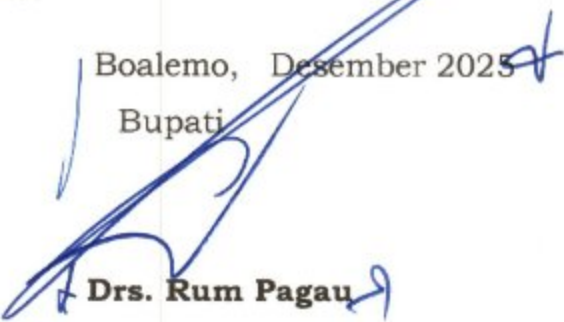
Melalui dokumen ini, Pemerintah Kabupaten Boalemo berharap dapat memperkuat sinergi antarperangkat daerah, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan akademisi dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan kependudukan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial ekonomi. Kolaborasi ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam membangun masyarakat Boalemo yang berkualitas, sejahtera, dan berdaya saing.

KABAG HUKUM	DINAS/DAMI KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen PJPK ini. Semoga dokumen ini menjadi panduan yang bermanfaat dalam mewujudkan pembangunan kependudukan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Kabupaten Boalemo.

Boalemo, Desember 2025

Bupati


Drs. Rum Pagau

DAFTAR ISI

SK BUPATI	iii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GRAFIK	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Sasaran	2
C. Dasar Hukum	3
D. Batasan Pengertian	5
E. Analisis Perkembangan Situasi Kependudukan	6
1. Pengelolaan Kuantitas Penduduk	6
2. Peningkatan Kualitas Penduduk	23
3. Pembangunan Keluarga	49
4. Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk	65
5. Administrasi Kependudukan	66
F. Isu Strategis Pembangunan Kependudukan	67
BAB II. SASARAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN	70
A. Arah Kebijakan, Strategi dan Target Pengelolaan Kuantitas Penduduk	70
B. Arah Kebijakan, Strategi dan Target Peningkatan Kualitas Penduduk	70
C. Arah Kebijakan, Strategi dan Target Pembangunan Keluarga	72
D. Arah Kebijakan, Strategi dan Target Penataan Pesebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk	73
E. Arah Kebijakan, Strategi dan Target Penataan Administrasi Data Kependudukan	73
BAB III. RENCANA AKSI	80
A. Tata Kelola Pembangunan Kependudukan	80
B. Rencana Aksi Tahun 2025-2029	81
C. Kerangka Kelembagaan Pembangunan Kependudukan	82
D. Koordinasi dan Penguatan Kelembagaan	83
BAB IV. PENUTUP	91
A. Pemantauan	91
B. Evaluasi	91
C. Pelaporan	92

KABAG HUKUM	DINASEKDA KABUP	ASE	SEKDA	WABUP
				

KABAG HUKUM	DINASISAGAN KANTOR	ASS	SEKDA	WASUP
				

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Pendudukan Kabupaten Boalemo, 2020-2024	7
Tabel 2	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Boalemo, 2020-2024	8
Tabel 3	Tingkat Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Boalemo, 2021-2024	11
Tabel 4	Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Umur Kabupaten Boalemo Tahun 2024	12
Tabel 5	Angka Kematian Balita, Bayi, Anak dan Ibu Kabupaten Boalemo, 2023	19
Tabel 6	Jumlah Kematian Penduduk Kabupaten Boalemo, 2021-2025	20
Tabel 7	Migrasi Penduduk Kabupaten Boalemo 2021-2024	21
Tabel 8	Indikator Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Boalemo Tahun 2020-2024	24
Tabel 9	Jumlah Sekolah dan Guru Pendidikan Dasar setiap Kecamatan di Kabupaten Boalemo Tahun 2024	30
Tabel 10	Rasio Guru dan Murid Pendidikan Dasar di Kabupaten Boalemo Tahun 2024	29
Tabel 11	Jumlah Penemuan Kasus TBC,HIV/AIDS, Malaria, DBD di Kabupaten Boalemo Tahun 2022 – 2024.....	35
Tabel 12	Kemiskinan di Kabupaten Boalemo Tahun 2020 – 2024	36
Tabel 13	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin Kabupaten Boalemo, 2024	38
Tabel 14	PDRB Perkapita (ADHB dan ADHK) Kabupaten Boalemo Tahun 2020-2024	49
Tabel 15	Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Boalemo, 2024	50
Tabel 16	Jumlah Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum di Kabupaten Boalemo, 2024.....	51
Tabel 17	Cakupan Sarana Air Minum, 2024.....	52
Tabel 18	Cakupan Akses Sanitasi Kabupaten Boalemo, 2024	53
Tabel 19	Sebaran Pendudukan Kabupaten Boalemo, 2020-2024.....	54
Tabel 20	Indikator Bidang urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, 2023-2024	56
Tabel 21	Matriks Analisis PSRI Pengelolaan Kuantitas Penduduk Kabupaten Boalemo	59

KADAG HUKUM	DINSIBADMI KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

Tabel 22	Matriks Analisis PSRI Peningkatan Kualitas Penduduk Kabupaten Boalemo	59
Tabel 23	Matriks Analisis PSRI Pembangunan keluarga di Kabupaten Boalemo	63
Tabel 24	Matriks Analisis PSRI Pesebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk Kabupaten Boalemo	65
Tabel 25	Matriks Analisis PSRI Penataan Administrasi Kependudukan Kabupaten Boalemo	66
Tabel 26	Rencana Aksi Pengembangan Kependudukan Kabupaten Boalemo	84

KASAB HUKUM	DIREKSI KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Boalemo, 2020-2024	10
Grafik 2	Angka Kelahiran dalam satu Tahun Kabupaten Boalemo, 2020-2024	14
Grafik 3	Grafik Child Woman Rate (CWR) Kabupaten Boalemo, 2020-2024	15
Grafik 4	Grafik Perbandingan ASFR Kabupaten Boalemo tahun 2020 dan 2024	16
Grafik 5	Persentase ASFR Usia 15-19 Kabupaten Boalemo, 2020-2024	17
Grafik 6	Trend TFR Kabupaten Boalemo, 2020-2025.....	18
Grafik 7	Piramida Penduduk Kabupaten Boalemo, 2024	22
Grafik 8	Angka partisipasi sekolah (APS) Kabupaten Boalemo Tahun 2021-2023	25
Grafik 9	Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2024	26
Grafik 10	Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTS, 2021 – 2024...	27
Grafik 11	Angka Harapan Sekolah Kabupaten Boalemo Tahun 2020 – 2024	28
Grafik 12	Angka Partisipasi Kuliah Kabupaten Boalemo Tahun, 2020 – 2024	30
Grafik 13	Usia Harapan Hidup di Kabupaten Boalemo Tahun 2020-2024	32
Grafik 14	Presentase Stunting pada Balita di Kabupaten Boalemo Berdasarkan SSGI Tahun 2020 – 2024	32
Grafik 15	Angka Kematian Bayi di Kabupaten Boalemo Tahun 2020 – 2024	33
Grafik 16	Angka Kematian Ibu di Kabupaten Boalemo Tahun 2020 – 2024	34
Grafik 17	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Boalemo Tahun 2020-2024....	37
Grafik 18	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Kabupaten Boalemo, 2020-2024	39
Grafik 19	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Boalemo Tahun 2020-2024	40
Grafik 20	Sertifikat Tenaga Kerja Kabupaten Boalemo, 2020-2024....	41
Grafik 21	Tren Pekerja Informal Kabupaten Boalemo, 2020-2024.....	42

KABAG HUKUM	DINAS/BAKOR KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

Grafik 22	Jumlah Penyandang Disabilitas Kabupaten Boalemo, 2020-2024	43
Grafik 23	Persentase Disabilitas bekerja di Sektor Formal Kabupaten Boalemo, 2020-2024	44
Grafik 24	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Boalemo Tahun 2020-2024	45
Grafik 25	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Boalemo Tahun 2020-2024	46
Grafik 26	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Boalemo Tahun 2020-2024	47
Grafik 27	Indeks Gini Kabupaten Boalemo Tahun 2020-2024	48
Grafik 28	Rate Nett Migration (Migrasi Netto) Kabupaten Boalemo, 2021-204	55

KABAG HUKUM	DINAMISASI KANTOR	SS	SEKDA	WABUP
				

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kependudukan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks pembangunan Kabupaten Boalemo, kependudukan menjadi pilar penting untuk mewujudkan visi daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Boalemo Tahun 2025–2029, yaitu *“Terwujudnya Kabupaten Boalemo yang Produktif dan Berdaya Saing Tahun 2030.”* Visi ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk membangun masyarakat Boalemo yang kompetitif, inovatif, dan mandiri melalui peningkatan produktivitas ekonomi, penguatan kualitas sumber daya manusia, serta pemerataan kesejahteraan.

Kabupaten Boalemo dihadapkan pada berbagai dinamika kependudukan yang kompleks, di antaranya laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, ketimpangan persebaran antarwilayah, serta perubahan struktur umur penduduk yang menuntut kesiapan menghadapi bonus demografi. Tantangan ini menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan jangka menengah daerah yang menekankan pentingnya pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam RPJMD 2025–2029, arah pembangunan difokuskan pada penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan sebagai upaya membangun sumber daya manusia Boalemo yang unggul dan berdaya saing.

Selain itu, Boalemo masih menghadapi permasalahan sosial ekonomi seperti tingkat kemiskinan, stunting, dan keterbatasan akses layanan dasar di beberapa wilayah perdesaan. Kondisi ini menuntut sinergi antarperangkat daerah dalam merancang kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penguatan kapasitas kelembagaan, penyediaan infrastruktur sosial, dan pemerataan akses pelayanan publik menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan kesejahteraan yang inklusif.

Pembangunan kependudukan di Boalemo juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga berperan strategis dalam membentuk kualitas generasi mendatang yang sehat, berpendidikan, dan berkarakter. Oleh karena itu, kebijakan kependudukan tidak hanya berorientasi pada aspek kuantitatif,

KATAG HUMAN	DINASISAN NAPOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

tetapi juga harus memperhatikan dimensi sosial budaya, nilai-nilai lokal, serta pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga.

Pemerintah Kabupaten Boalemo menempatkan pembangunan kependudukan sebagai fondasi utama untuk mendukung pencapaian misi daerah, antara lain: meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing; memperkuat ekonomi daerah berbasis potensi unggulan lokal; serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, inovatif, dan melayani. Dengan integrasi PJPK dalam kerangka RPJMD, diharapkan seluruh program pembangunan mampu berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk.

Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Kabupaten Boalemo Tahun 2025–2029 juga menjadi wujud implementasi pendekatan pembangunan manusia yang berkelanjutan. PJPK berfungsi sebagai instrumen perencanaan strategis yang memadukan kebijakan kependudukan dengan prioritas pembangunan daerah. Dokumen ini mengarahkan sinergi antarperangkat daerah agar pelaksanaan program pembangunan dapat berorientasi pada pengendalian penduduk, peningkatan kualitas keluarga, serta perlindungan kelompok rentan.

Penduduk diposisikan sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Pemerintah daerah meyakini bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan kependudukan di Boalemo menekankan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pendidikan dalam upaya mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan.

Dengan demikian, dokumen ini diharapkan menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Boalemo yang produktif dan berdaya saing.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan penyusunan PJPK Kabupaten Boalemo Tahun 2025–2029 adalah untuk memberikan arah, landasan, dan pedoman strategis dalam mewujudkan pembangunan kependudukan yang sejalan dengan visi daerah, *“Terwujudnya Kabupaten Boalemo yang Produktif dan Berdaya Saing Tahun 2030.”* Tujuan tersebut diwujudkan melalui pengendalian

KABAG HUKUM	DINASISADIN KANTOR	SS	SEKDA	WABUP
				

pertumbuhan penduduk, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Secara umum tujuan PJPk adalah:

1. Mengarahkan pelaksanaan pembangunan kependudukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan di seluruh sektor pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan koordinasi antarperangkat daerah dalam pengelolaan kebijakan kependudukan;
3. Mengintegrasikan aspek kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan sektoral;
4. Mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan penduduk, daya dukung lingkungan, serta ketersediaan sumber daya alam dan ekonomi lokal.

Sasaran penyelenggaraan PJPk Kabupaten Boalemo Tahun 2025–2029 meliputi:

1. Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk melalui peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana dan pengendalian fertilitas;
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, yang ditandai dengan peningkatan derajat pendidikan, kesehatan, dan produktivitas tenaga kerja;
3. Terwujudnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui penguatan fungsi ekonomi, sosial, dan pendidikan keluarga;
4. Tersedianya sistem data dan informasi kependudukan yang terintegrasi, mutakhir, dan berbasis digital untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah;
5. Terwujudnya pemerataan distribusi penduduk antarwilayah dan pengelolaan mobilitas penduduk yang berkelanjutan;
6. Tumbuhnya kemitraan dan partisipasi aktif masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat dalam pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana.

C. Dasar Hukum

Penyusunan PJPk Kabupaten Boalemo Tahun 2025–2029 berpedoman pada dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6843);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024 dan arah kebijakan RPJMN 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

KABAG HUKUM	DINAS/DIR KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1446);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2029;
13. Keputusan Bupati Boalemo Nomor 011/348/XI/2025 tentang Tim Penyusun Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Boalemo Periode Tahun 2025-2029.

D. Batasan Pengertian

Untuk memberikan pemahaman yang seragam dalam penyusunan PJP, digunakan beberapa pengertian sebagai berikut:

1. **Kependudukan** adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
2. **Pembangunan Kependudukan** adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
3. **Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga** adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.
4. **Keluarga** adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
5. **Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo** adalah bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam lingkup Kabupaten Boalemo.
6. **Perangkat Daerah** adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
7. **Kuantitas Penduduk** adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.

KABAG HUKUM	DINAS/SEKSI KANTOR	ASB	SEKDA	WAGUP
				

8. **Kualitas Penduduk** adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.
9. **Pembangunan Keluarga** adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
10. **Penataan Persebaran Penduduk** adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
11. **Pengarahannya Mobilitas Penduduk** adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
12. **Mobilitas Penduduk** adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
13. **Administrasi Kependudukan** adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
14. **Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK)** adalah dokumen operasionalisasi GDPK selama 5 tahun yang memuat analisis situasi kependudukan, kebijakan dan strategi, sasaran, indikator, target per tahun, dan rencana aksi untuk mencapai target pembangunan kependudukan.
15. **Rencana Aksi** adalah langkah-langkah dan kegiatan operasional yang rinci untuk mencapai tujuan tertentu termasuk sasaran, Indikator, program, kegiatan, dan penanggung jawab. sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang berwenang dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan kependudukan di wilayahnya.

E. Analisis Perkembangan Situasi Kependudukan

1. Pengelolaan Kuantitas Penduduk

a. Jumlah, Pertumbuhan, Komposisi dan Kepadatan Penduduk

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Boalemo selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan pola peningkatan yang relatif stabil dengan laju pertumbuhan yang berfluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2020, jumlah

KABUPATEN BOALEMO	DINASBADAN KEMENTER	ASS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

penduduk tercatat sebanyak 145.868 jiwa dengan laju pertumbuhan 1,18%, mencerminkan peningkatan alami dan migrasi yang masih cukup konsisten. Memasuki tahun 2021, pertumbuhan penduduk sedikit melambat dengan jumlah mencapai 147.038 jiwa dan laju pertumbuhan 0,60%, penurunan yang kemungkinan dipengaruhi oleh dinamika sosial dan ekonomi pascapandemi. Perubahan ini menjadi titik awal yang menunjukkan bagaimana faktor eksternal turut memengaruhi dinamika kependudukan Boalemo.

Pada tahun 2022, pertumbuhan penduduk kembali mengalami kenaikan dengan jumlah mencapai 148.526 jiwa dan laju pertumbuhan meningkat menjadi 1,04%. Tren ini berlanjut pada tahun 2023 di mana jumlah penduduk meningkat menjadi 149.770 jiwa, mempertahankan laju pertumbuhan 1,04%. Konsistensi laju pertumbuhan selama dua tahun tersebut menandakan stabilnya angka kelahiran dan mulai meredanya dampak guncangan demografis sebelumnya. Memasuki tahun 2024, jumlah penduduk meningkat lebih signifikan menjadi 152.851 jiwa, meskipun laju pertumbuhan sedikit menurun ke 0,82%, yang menunjukkan adanya porsi peningkatan populasi dari migrasi internal maupun penyesuaian data kependudukan. Transisi antartahun ini menggambarkan bagaimana faktor kelahiran, migrasi, dan pembaruan data berkontribusi secara dinamis terhadap perubahan jumlah penduduk.

Tabel 1.

Jumlah dan Laju Pertumbuhan Pendudukan Kabupaten Boalemo, 2020-2024

Tahun	Jumlah Pendudukan	Laju Pertumbuhan Penduduk
2020	145.868	1.18
2021	147.038	0,60
2022	148.526	1,04
2023	149.770	1,04
2024	152.851	0.82

Sumber: BPS Kabupaten Boalemo, 2025

Secara keseluruhan, pertumbuhan penduduk Boalemo berada dalam kisaran moderat dan stabil, mencerminkan dinamika demografis yang relatif dapat dikelola. Walaupun laju pertumbuhan berubah dari tahun ke tahun, peningkatan jumlah penduduk secara bertahap memberikan ruang

bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan perencanaan pembangunan, terutama dalam pemenuhan layanan dasar, pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Dengan demikian, pola pertumbuhan ini menjadi landasan penting bagi penyusunan kebijakan kependudukan jangka menengah agar selaras dengan kapasitas wilayah dan kebutuhan masyarakat.

Jumlah penduduk yang banyak dan memiliki kualitas yang baik merupakan aset utama dalam mendorong perkembangan ekonomi dan sosial daerah. Namun, apabila pertumbuhan penduduk yang besar tidak dibarengi peningkatan kualitas sumber daya manusianya, kondisi tersebut dapat berbalik menjadi tantangan karena pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan akan terserap oleh kebutuhan konsumsi penduduk. Oleh sebab itu, pengendalian pertumbuhan penduduk, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ketahanan keluarga menjadi prioritas yang harus dirancang secara terarah agar perkembangan jumlah penduduk dapat memberikan manfaat optimal.

Untuk memastikan penduduk tidak hanya menjadi objek tetapi juga subjek pembangunan, pemberdayaan masyarakat harus dilakukan secara terpadu melalui koordinasi lintas perangkat daerah dan melibatkan aktif masyarakat. Dengan pendekatan ini, pembangunan kependudukan tidak hanya bertumpu pada pencapaian indikator statistik, tetapi juga berorientasi pada peningkatan kapasitas, kesejahteraan, dan kualitas hidup seluruh masyarakat Kabupaten Boalemo. Hubungan antarparagraf ini menegaskan bahwa dinamika pertumbuhan penduduk harus selalu dikaitkan dengan kualitas dan kesejahteraan sebagai satu kesatuan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 2

Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Boalemo, 2020-2024

Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk				
	2010-2020	2020-2021	2020-2022	2022-2023	2023-2024
Mananggu	1.08	0.53	0.93	1.80	1,41
Tilamuta	1.31	0.70	1.19	1.27	0,62
Dulupi	1.23	0.64	1.10	1.53	0,36

Botumoito	0.80	0.32	0.61	0.88	0,46
Paguyaman	1.27	0.67	1.15	1.15	1,48
Wonosari	1.14	0.57	1.00	1.00	0,10
Paguyaman Pantai	1.15	0.58	1.01	1.01	0,90
Kabupaten Boalemo	1.18	0.60	1.04	1.04	0,82

Sumber: BPS Kabupaten Boalemo, 2025

Pola laju pertumbuhan penduduk per kecamatan di Kabupaten Boalemo tahun 2020–2024 memperlihatkan dinamika yang tidak seragam antarwilayah, namun secara umum masih sejalan dengan tren pertumbuhan moderat yang sebelumnya telah diuraikan pada tingkat kabupaten. Jika dilihat dari periode 2010–2020, seluruh kecamatan menunjukkan laju pertumbuhan tahunan yang relatif mirip (berkisar 0,80–1,31%), dengan angka tertinggi di Tilamuta (1,31%) dan Paguyaman (1,27%). Ini menunjukkan bahwa dalam jangka menengah, pertumbuhan penduduk di Boalemo cenderung stabil dan terkonsentrasi di kecamatan yang menjadi pusat pelayanan dan aktivitas ekonomi. Angka kabupaten (1,18%) berada di tengah-tengah rentang ini, mencerminkan kontribusi relatif seimbang dari masing-masing kecamatan terhadap pertumbuhan total.

Memasuki periode 2020–2024, dinamika pertumbuhan mulai tampak lebih beragam. Pada fase awal 2020–2021 dan 2020–2022, seluruh kecamatan menunjukkan laju pertumbuhan yang sejalan dengan tren kabupaten (sekitar 0,60–1,04%), dengan kecamatan seperti Paguyaman, Tilamuta, dan Dulupi konsisten sedikit di atas rata-rata. Namun pada periode 2022–2023 dan terutama 2023–2024, terlihat beberapa kecamatan tumbuh lebih cepat, seperti Mananggu (1,80% lalu 1,41%) dan Paguyaman (1,15% lalu 1,48%), sementara kecamatan lain mengalami perlambatan cukup tajam, misalnya Wonosari (turun menjadi 0,10%) dan Dulupi (0,36%). Hal ini mengindikasikan adanya pergeseran dinamika, baik dari sisi kelahiran, migrasi, maupun konsentrasi pelayanan dan aktivitas ekonomi antarwilayah.

KABAG HUKUM	DINASISASI KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

Grafik 1.

Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Boalemo, 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Boalemo, 2025 (Diolah)

Dengan demikian walaupun cenderung fluktuatif, pertumbuhan penduduk kabupaten cenderung moderat dan stabil, variasi antar kecamatan ini memberi pesan penting bagi perencanaan pembangunan kependudukan Boalemo. Kecamatan dengan laju pertumbuhan lebih tinggi (seperti Mananggu dan Paguyaman) berpotensi menghadapi tekanan lebih besar terhadap kebutuhan layanan dasar—pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, dan lapangan kerja—sehingga memerlukan perhatian khusus dalam alokasi program dan infrastruktur. Sebaliknya, kecamatan dengan pertumbuhan yang melambat perlu dianalisis lebih lanjut: apakah disebabkan oleh migrasi keluar, struktur umur yang menua, atau faktor ekonomi lain. Dengan demikian, kebijakan pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas penduduk yang telah dibahas sebelumnya perlu diterjemahkan secara lebih rinci per kecamatan, agar pertumbuhan penduduk yang moderat di tingkat kabupaten benar-benar diikuti oleh peningkatan kualitas hidup dan keseimbangan pembangunan antar wilayah.

KABUPATEN BOALEMO	DINAS BAKOSUR	ASB	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Tabel 3

Tingkat Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Boalemo, 2021-2024

Kecamatan	Luas (KM ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/KM ²)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Mananggu	300.92	42.74	43.04	43.61	44,40	45,02
Tilamuta	190.63	159.63	161.12	162.50	164,56	165,58
Dulupi	300.92	57.63	58.12	57.97	58,86	59,07
Botumoito	487.38	31.08	31.21	32.29	32,57	32,91
Paguyaman	195.43	173.69	175.24	178.38	180,51	183,19
Wonosari	236.08	118.32	119.23	122.56	123,72	123,84
Paguyaman Pantai	119.45	71.48	72.03	72.78	73,72	74,38
Kabupaten Boalemo	1.839.87	79.65	80.29	81.80	82,81	83,49

Sumber: BPS Kabupaten Boalemo, 2025

Tingkat kepadatan penduduk per kecamatan di Kabupaten Boalemo tahun 2021–2024 menunjukkan bahwa persebaran penduduk tidak merata dan terkonsentrasi pada kecamatan tertentu. Kecamatan dengan kepadatan tertinggi secara konsisten adalah Paguyaman dan Tilamuta. Pada tahun 2021, kepadatan di Paguyaman sudah mencapai 175,24 jiwa/km² dan terus meningkat hingga 183,19 jiwa/km² pada 2024. Tilamuta menyusul dengan kepadatan 161,12 jiwa/km² pada 2021 dan naik menjadi 165,58 jiwa/km² pada 2024. Kedua kecamatan ini merupakan pusat kegiatan ekonomi, pelayanan publik, dan pemerintahan, sehingga wajar jika menjadi magnet konsentrasi penduduk. Sebaliknya, kecamatan seperti Botumoito dan Mananggu memiliki kepadatan lebih rendah (sekitar 31–45 jiwa/km²), mencerminkan karakter wilayah yang lebih luas, bercorak pedesaan, dan belum sepadat pusat kabupaten.

Secara agregat, kepadatan penduduk Kabupaten Boalemo juga menunjukkan tren meningkat dari 80,29 jiwa/km² pada 2021 menjadi 83,49 jiwa/km² pada 2024. Peningkatan ini konsisten dengan ulasan sebelumnya tentang pertumbuhan penduduk yang moderat namun stabil, di mana kenaikan jumlah penduduk berlangsung bertahap dan tersebar di

KAB. BOALEMO	DINAS KEM. KANTOR	ASB	SEKDA	WABUP
				

seluruh kecamatan, dengan akselerasi lebih kuat di wilayah-wilayah tertentu. Kecenderungan meningkatnya kepadatan di Paguyaman, Tilamuta, dan Wonosari mengindikasikan adanya tekanan yang lebih besar terhadap ketersediaan dan kualitas layanan dasar di wilayah-wilayah ini—mulai dari pemukiman, air bersih, sanitasi, transportasi, hingga fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Wilayah dengan kepadatan tinggi perlu mendapatkan prioritas penguatan infrastruktur dan layanan dasar agar tidak terjadi penurunan kualitas hidup akibat “overload” penduduk. Sementara itu, kecamatan dengan kepadatan lebih rendah seperti Botumoito dan Paguyaman Pantai berpotensi dikembangkan melalui penguatan ekonomi lokal, aksesibilitas, dan layanan publik untuk mendorong sebaran penduduk yang lebih proporsional. Dengan demikian, pengelolaan kepadatan penduduk menjadi bagian penting dari strategi pembangunan kependudukan yang mengaitkan pertumbuhan jumlah, kualitas penduduk, dan daya dukung wilayah secara terpadu.

Tabel 4

**Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Umur
Kabupaten Boalemo Tahun 2024**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	
	Laki-laki	Perempuan	Jiwa	%
0 – 4	6.887	6.709	13.596	8.98
5 – 9	5.913	5.731	11.644	7.69
10 – 14	6.169	5.859	12.028	7.95
15 – 19	7.138	6.623	13.761	9.09
20 – 24	7.067	6.586	13.653	9.02
25 – 29	6.627	6.280	12.907	8.53
30 – 34	6.344	6.086	12.430	8.21
35 – 39	5.669	5.503	11.172	7.38
40 – 44	5.372	5.312	10.684	7.06
45 – 49	5.155	5.048	10.203	6.74
50 – 54	4.509	4.232	8.741	5.78

KABAG
HUKUM

DINASISDAN
KANTOR

ASE

SEKDA

WAGUP

55 – 59	3.639	3.373	7.012	4.63
60 – 64	2.589	2.539	5.128	3.39
65 – 69	1.781	1.894	3.675	2.43
70 – 74	1.164	1.247	2.411	1.59
75+	1.076	1.216	2.292	1.51
Total Boalemo	77.099	74.238	151.337	100.00

Sumber: BPS Kabupaten Boalemo, 2025

Komposisi penduduk Kabupaten Boalemo tahun 2024 menunjukkan struktur demografis yang masih didominasi oleh kelompok usia produktif, namun dengan distribusi yang cukup seimbang di antara kelompok umur muda, dewasa, dan lanjut usia. Kelompok usia 15–19 tahun dan 20–24 tahun merupakan kelompok terbesar, masing-masing mencapai 13.761 jiwa (9,09%) dan 13.653 jiwa (9,02%), diikuti oleh kelompok usia 0–4 tahun (13.596 jiwa atau 8,98%) dan 25–29 tahun (12.907 jiwa atau 8,53%). Pola ini mencerminkan struktur penduduk dengan basis usia muda yang cukup kuat dan potensi bonus demografi yang besar, sejalan dengan pertumbuhan penduduk moderat yang sebelumnya diuraikan. Jumlah penduduk laki-laki (77.099 jiwa) sedikit lebih tinggi dibanding perempuan (74.238 jiwa), dengan selisih yang masih dalam batas normal struktur penduduk.

Distribusi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur menunjukkan bahwa mayoritas penduduk berada pada usia produktif (15–64 tahun), yang secara keseluruhan menempati lebih dari 65% populasi Boalemo. Hal ini menjadi peluang besar bagi peningkatan produktivitas daerah, namun sekaligus menuntut penyediaan layanan pendidikan, pelatihan kerja, lapangan kerja, serta fasilitas kesehatan yang memadai. Di sisi lain, proporsi kelompok usia tua (65 tahun ke atas) berada pada kisaran 5,5%, yang menandakan mulai meningkatnya kebutuhan pelayanan sosial dan kesehatan lansia dalam beberapa tahun ke depan.

Ketersediaan tenaga kerja usia muda yang besar perlu diimbangi dengan pendidikan yang memadai, keterampilan kerja yang relevan, dan kesehatan yang baik agar tidak berubah menjadi beban pembangunan. Dengan demikian, komposisi penduduk 2024 menjadi salah satu dasar penting dalam merancang kebijakan kependudukan yang memadukan aspek jumlah, kualitas, dan kesejahteraan penduduk secara terpadu.

KABAG HUKUM	UMASAGNI KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

b. Angka Kelahiran

Tren angka kelahiran di Kabupaten Boalemo sepanjang periode 2020–2024 menunjukkan pola yang fluktuatif namun tetap berada dalam kisaran jumlah kelahiran yang relatif stabil. Pada tahun 2020 tercatat 2.611 kelahiran, kemudian angka ini menurun cukup signifikan pada tahun 2021 menjadi 2.475 kelahiran, yang diduga kuat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat pascapandemi COVID-19, termasuk perubahan perilaku berkeluarga dan akses layanan kesehatan reproduksi. Pada tahun 2022 angka kelahiran meningkat kembali menjadi 2.626 kelahiran, diikuti kenaikan yang lebih tinggi pada 2023 mencapai 2.707 kelahiran, menunjukkan pemulihan pola fertilitas masyarakat dan membaiknya akses layanan kesehatan ibu dan anak.

Grafik 2.

Angka Kelahiran dalam satu Tahun Kabupaten Boalemo, 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo, 2025

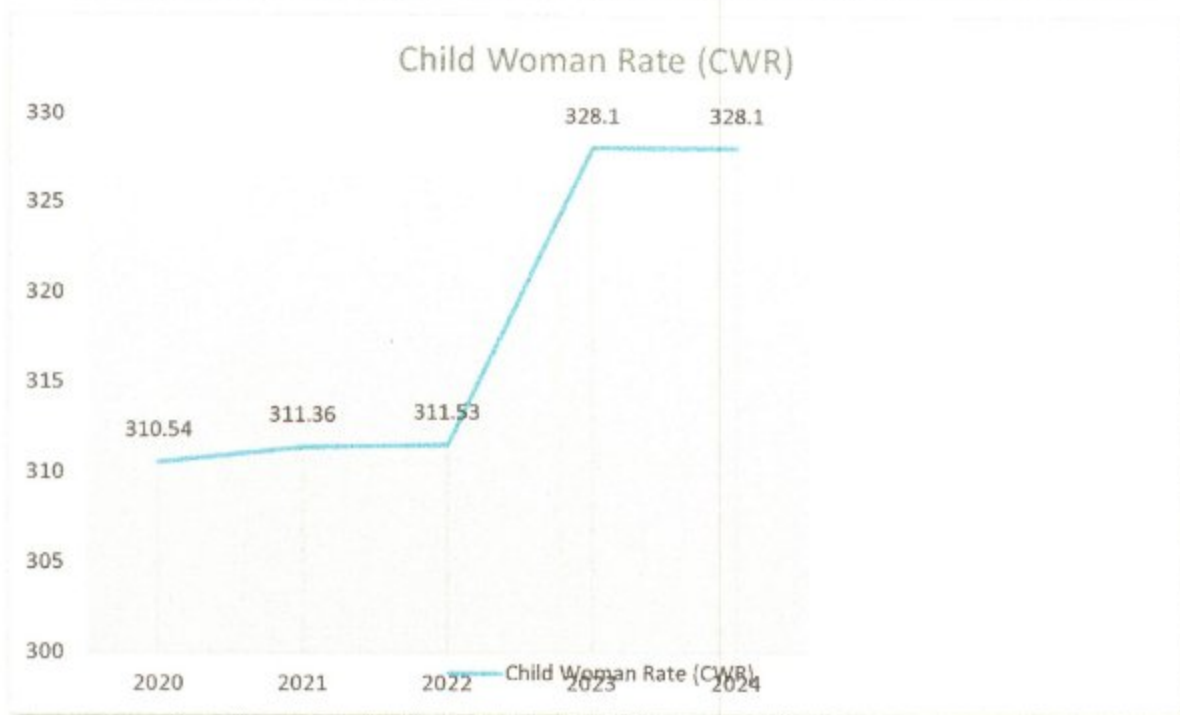
Namun, peningkatan tersebut tidak berlangsung konsisten, karena pada tahun 2024 angka kelahiran kembali turun menjadi 2.539 kelahiran. Penurunan ini sejalan dengan tren penurunan pertumbuhan penduduk tahun 2024 yang sebelumnya telah dijelaskan, menunjukkan bahwa dinamika kelahiran dan migrasi memiliki pengaruh yang saling terkait. Meskipun angka kelahiran mengalami naik-turun, secara keseluruhan jumlah kelahiran di Kabupaten Boalemo masih berada dalam rentang 2.500–2.700 kelahiran per tahun, yang menggambarkan stabilitas fertilitas dalam jangka menengah.

KABAG HUKUM	DINAS KANTOR	ASE	SEHDA	WABUP

Stabilnya angka kelahiran memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk merencanakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak secara lebih terukur. Namun, penurunan angka kelahiran di 2024 perlu dicermati, apakah merupakan pola sementara atau indikasi perubahan perilaku berkeluarga jangka panjang. Oleh karena itu, kebijakan penguatan layanan kesehatan reproduksi, konseling keluarga berencana, dan peningkatan akses ibu hamil di seluruh kecamatan tetap menjadi prioritas dalam upaya menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dan daya dukung pembangunan daerah.

Grafik 3.

Grafik Child Woman Rate (CWR) Kabupaten Boalemo, 2020-2024



Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Child Woman Rate (CWR) Kabupaten Boalemo dalam lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat, yang mengindikasikan adanya kenaikan jumlah anak usia 0–4 tahun per 1.000 perempuan usia 15–49 tahun. Pada tahun 2020, nilai CWR masih berada pada kisaran 310,54, kemudian mengalami peningkatan marginal pada tahun 2021 (311,36) dan 2022 (311,58). Kenaikan kecil ini mencerminkan kondisi fertilitas yang relatif stabil dan tidak menunjukkan perubahan signifikan dalam perilaku reproduksi masyarakat selama tiga tahun pertama periode pengamatan.

Perubahan besar terjadi mulai tahun 2023, di mana nilai CWR melonjak cukup tajam menjadi 328,1, dan bertahan pada angka yang sama di tahun 2024. Lonjakan ini memperlihatkan peningkatan jumlah anak kecil relatif terhadap jumlah perempuan usia reproduktif, yang dapat

KABAG HUKUM	DIRSASOM KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

dikaitkan dengan beberapa faktor, seperti meningkatnya angka kelahiran pada 2023, pemulihan layanan kesehatan pascapandemi, serta dampak penundaan kelahiran pada tahun sebelumnya. Pola ini juga selaras dengan data angka kelahiran, di mana tahun 2023 mencatat jumlah kelahiran tertinggi dalam periode 2020–2024.

Kondisi ini perlu direspons dengan peningkatan kapasitas layanan kesehatan ibu dan anak, PAUD, serta pendidikan dasar. Dari perspektif kebijakan kependudukan, peningkatan CWR menegaskan pentingnya penguatan layanan KB, edukasi kesehatan reproduksi, dan pemantauan fertilitas untuk menjaga keseimbangan antara angka kelahiran, kualitas penduduk, dan daya dukung pembangunan daerah.

Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur (*Age Specific Fertility Rate – ASFR*) merupakan angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran per 1.000 perempuan usia produktif (15-49 tahun) menurut kelompok umur yang sama. Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate - TFR*) adalah rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. Sedangkan Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate*) atau CBR adalah banyaknya kelahiran pada tahun tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama.

Grafik 4.

Grafik Perbandingan ASFR Kabupaten Boalemo tahun 2020 dan 2024



Sumber: DPPKBP3A Kabupaten Boalemo, 2025

Grafik di atas menunjukkan bahwa terjadi perubahan pola fertilitas perempuan di Kabupaten Boalemo dalam rentang usia 15–49 tahun antara tahun 2020 dan 2024. Pada usia 15–19 tahun, angka kelahiran menurun cukup tajam dari 49,6 pada 2020 menjadi 23,2 pada 2024. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan upaya penundaan usia perkawinan dini dan peningkatan kesadaran reproduksi remaja.

KADAG HUKUM	DINASRACAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

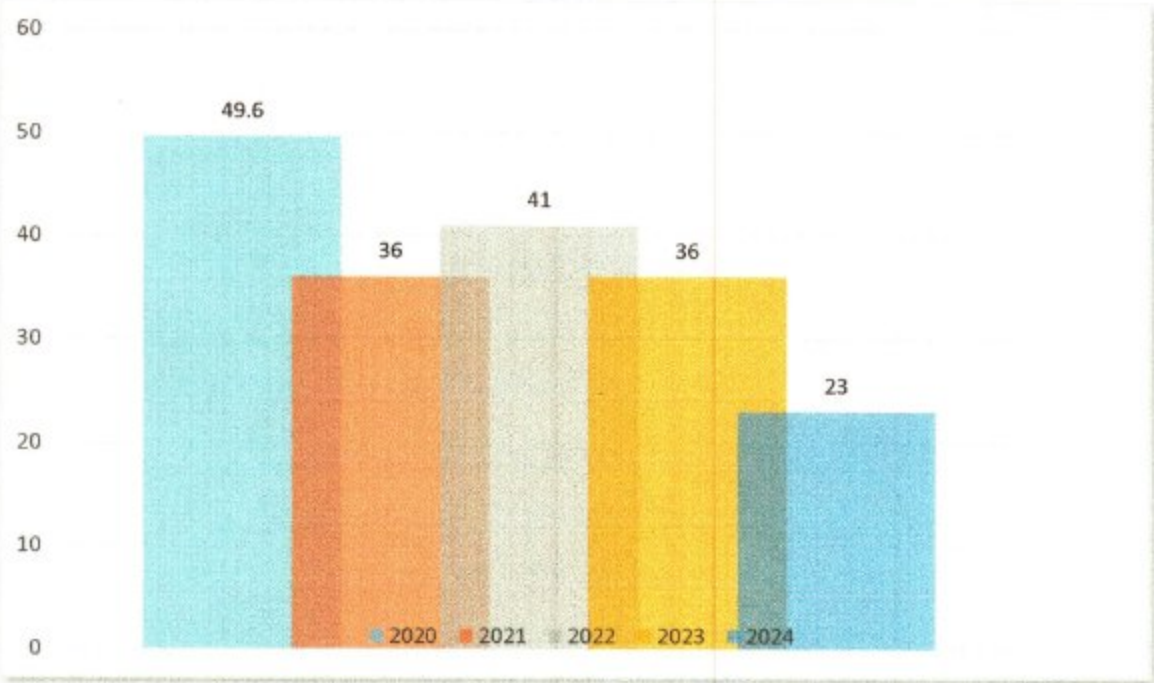
Pada kelompok usia 20–24 tahun, terjadi penurunan dari 110 menjadi 86,3, namun kelompok ini masih menjadi salah satu penyumbang kelahiran yang tinggi. Sementara itu, kelompok usia 25–29 tahun tetap merupakan fase puncak fertilitas, meskipun terjadi penurunan dari 139,2 menjadi 125,8. Di sisi lain, usia 30–34 tahun menunjukkan peningkatan fertilitas dari 88,3 menjadi 110, yang mengindikasikan pergeseran momentum kelahiran ke usia yang lebih matang. Kelompok usia 35–39 dan 40–44 menunjukkan penurunan fertilitas, namun kelompok 45–49 justru menunjukkan peningkatan kecil dari 1,9 menjadi 16,1, meski angka ini tetap relatif rendah secara demografis.

Secara keseluruhan, tren tersebut menunjukkan bahwa pola kelahiran di Kabupaten Boalemo semakin bergeser ke kelompok usia yang lebih matang, sekaligus mencerminkan keberhasilan pengendalian kelahiran pada remaja. Namun, masih perlu penguatan layanan kesehatan reproduksi dan kesadaran keluarga berencana di kelompok usia produktif agar pengaturan kelahiran berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Tren tersebut jika difokuskan pada ASFR Usia 15-19 tahun dalam 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat trend-nya pada grafik berikut.

Grafik 5

Persentase ASFR Usia 15-19 Kabupaten Boalemo, 2020-2024



Sumber: DPPKBP3A Kabupaten Boalemo, 2025

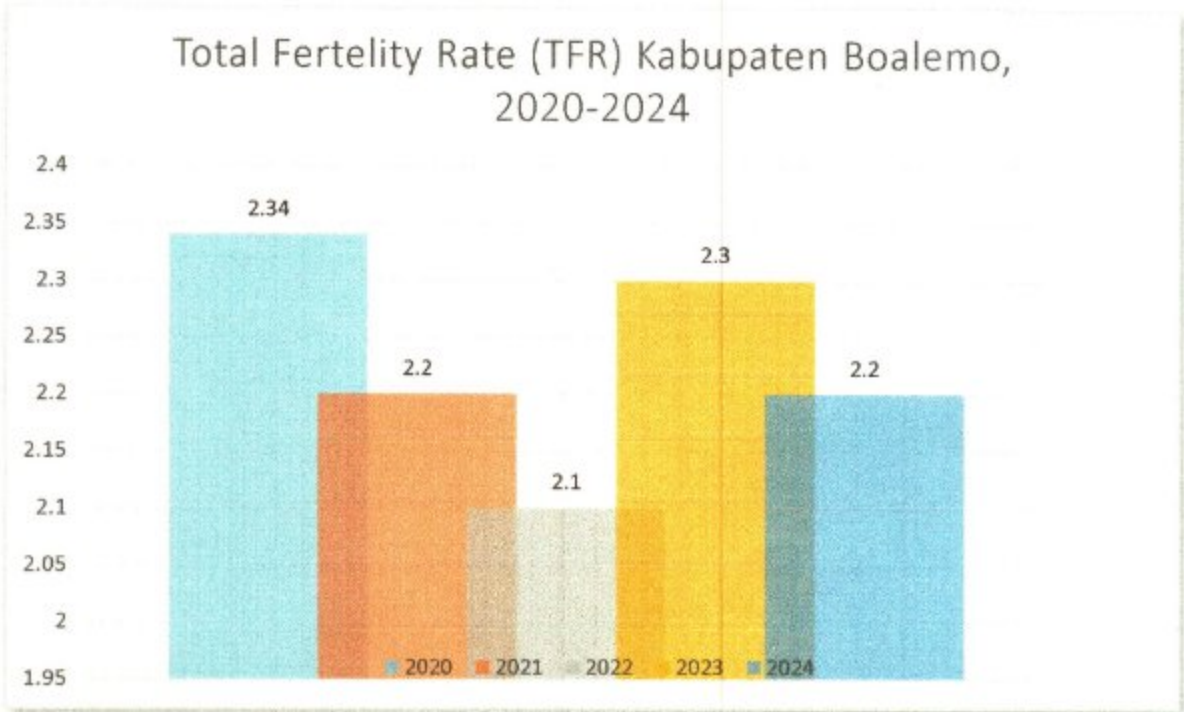
Grafik tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2020, angka fertilitas spesifik kelompok umur (ASFR) mencapai 49,6, menjadi nilai tertinggi pada periode pengamatan. Angka ini menunjukkan tingginya kelahiran pada remaja usia sekolah. Namun, pada tahun 2021, ASFR menurun cukup tajam menjadi 36, sebelum kembali meningkat pada 2022

mencapai 41, yang mencerminkan fluktuasi perilaku reproduktif remaja. Meskipun demikian, pada 2023, ASFR kembali berada pada angka 36, dan penurunan lebih drastis terjadi pada 2024, di mana ASFR remaja turun menjadi 23, nilai terendah dalam lima tahun terakhir.

Penurunan ini mengindikasikan semakin efektifnya program pencegahan perkawinan usia anak, meningkatnya akses edukasi kesehatan reproduksi, serta peran keluarga dan sekolah dalam mengurangi risiko kehamilan remaja. Selain itu, penurunan ASFR remaja juga menunjukkan keberhasilan intervensi lintas sektor dalam mendorong perencanaan keluarga dan memperluas akses kontrasepsi bagi kelompok usia muda. Tren ini menggambarkan pergeseran positif menuju penurunan kehamilan remaja, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup perempuan muda serta menurunkan risiko kesehatan ibu dan bayi.

Grafik 6

Trend TFR Kabupaten Boalemo, 2020-2025



Sumber: DPPKBP3A Kabupaten Boalemo, 2025

Jika dilihat dari Tingkat Fertilitas Total (TFR) Kabupaten Boalemo sebagaimana Grafik di atas, menunjukkan terjadinya fluktuasi ringan sepanjang periode 2020–2024, namun tetap berada pada kisaran yang relatif stabil. Pada tahun 2020, TFR berada di angka 2,34, menjadi nilai tertinggi dalam lima tahun terakhir. Tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 2,20, dan penurunan berlanjut pada tahun 2022 mencapai nilai terendah 2,10. Kondisi ini menunjukkan adanya penguatan penggunaan kontrasepsi, peningkatan kesadaran ber-KB, serta perbaikan akses layanan kesehatan reproduksi. Pada tahun 2023, TFR kembali meningkat menjadi

2,30, yang mengindikasikan adanya kenaikan angka kelahiran atau penurunan praktik pengendalian kelahiran. Tahun 2024 menunjukkan sedikit penurunan ke 2,20, mendekati tingkat penggantian penduduk (*replacement level fertility* $\approx$ 2,1).

Secara umum, TFR Kabupaten Boalemo berada dalam kategori mendekati stabil, dengan kecenderungan bergerak di sekitar angka penggantian penduduk. Fluktuasi kecil yang terjadi lebih menggambarkan perubahan pola ber-KB, kondisi sosial ekonomi, dan akses layanan kesehatan dalam jangka pendek.

c. Angka Kematian

1) Angka Kematian Bayi, Ibu dan Anak

Dilihat dari tabel, angka kematian balita (U5MR) Kabupaten Boalemo sebesar 33,24 per 1.000 kelahiran hidup, sedikit lebih baik dibanding rata-rata Provinsi Gorontalo (35,85), namun masih jauh lebih tinggi daripada rata-rata nasional (19,83). Pola yang sama terlihat pada angka kematian bayi (IMR): Boalemo 27,32, lebih rendah dari provinsi (29,47) tetapi masih jauh di atas nasional (16,85). Sementara itu, angka kematian anak (CMR) di Boalemo (5,92) juga berada di bawah rata-rata provinsi (6,39) namun hampir dua kali lipat angka nasional (2,98). Secara umum, data ini menunjukkan bahwa posisi Boalemo sedikit lebih baik dibanding rata-rata Provinsi Gorontalo, tetapi masih tertinggal cukup jauh dari standar nasional.

Tabel 5

Angka Kematian Balita, Bayi, Anak dan Ibu Kabupaten Boalemo, 2023

No.	Jenis Kematian	Boalemo	Prov. Gorontalo	Nasional
1	Angka Kematian Balita (Under Five Mortality Rate – U5MR)	33.24	35.85	19.83
2	Angka Kematian Bayi/AKB (Infant Mortality Rate – IMR)	27.32	29.47	16.85
3.	Angka Kematian Anak/AKA (Child Mortality Rate-CMR)	5.92	6.39	2.98
4	Angka Kematian Ibu/AKI (Maternal Mortality Rate-	-	226	189

KABAG HUKUM	DINASISDAS KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

MMR)			
------	--	--	--

Sumber: BPS, 2023

Untuk angka kematian ibu (AKI/MMR), data spesifik Boalemo belum tercantum, namun angka provinsi (226 per 100.000 kelahiran hidup) dan nasional (189) menggambarkan bahwa risiko kematian ibu masih cukup tinggi. Mengingat pola indikator lain di mana Boalemo cenderung sedikit lebih baik dari rata-rata provinsi namun di atas nasional, dapat diduga bahwa tantangan pada kesehatan ibu dan persalinan di Boalemo juga masih signifikan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan layanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan cakupan ANC dan persalinan di fasilitas kesehatan, perbaikan gizi ibu hamil dan balita, serta penguatan sistem rujukan obstetri dan neonatal.

Upaya penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita bukan hanya berpengaruh pada indikator kesehatan, tetapi juga berdampak langsung pada struktur umur penduduk, produktivitas jangka panjang, dan ketahanan keluarga. Karena itu, program penurunan AKI, AKB, dan U5MR perlu ditempatkan sebagai prioritas utama dalam Peta Jalan Pembangunan Kependudukan, melalui intervensi terintegrasi lintas sektor: kesehatan, sanitasi, gizi, pendidikan, dan pemberdayaan keluarga.

2) Tren Kematian Penduduk

Data kematian penduduk Kabupaten Boalemo selama periode 2021–2025 menunjukkan adanya kecenderungan naik-turun dengan pola umum pertumbuhan jumlah kematian dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 tercatat 784 kasus kematian, kemudian meningkat signifikan pada 2022 menjadi 981 jiwa. Tren peningkatan berlanjut pada 2023 dengan jumlah 1.140 kematian, yang pada saat itu menjadi angka tertinggi dalam lima tahun pertama.

Tabel 6

Jumlah Kematian Penduduk Kabupaten Boalemo, 2021-2025

No.	Tahun	Jumlah
1.	2021	784
2.	2022	981
3.	2023	1140
4.	2024	1022

KADAG HUNUM	DINASISDAK KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

5	2025	1270
Rata-Rata		1039

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, 2025

Pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 1.022 kematian. Penurunan ini dapat mencerminkan dampak kebijakan kesehatan, peningkatan layanan, atau faktor lingkungan tertentu. Meskipun demikian, angka tersebut kembali melonjak tajam pada tahun 2025 dengan mencapai 1.270 kematian—menjadi angka tertinggi selama periode analisis. Secara keseluruhan, rata-rata jumlah kematian per tahun pada periode ini adalah 1.039 jiwa.

d. Migrasi

Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain dalam jangka waktu tertentu, yang dapat berbentuk migrasi masuk (*in-migration*) maupun migrasi keluar (*out-migration*). Data migrasi menjadi penting untuk melihat apakah wilayah ini memiliki daya tarik bagi penduduk dari daerah lain atau justru mendorong penduduknya keluar untuk mencari peluang di tempat lain. Pergerakan penduduk ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan lapangan kerja, akses pendidikan, kualitas layanan dasar, serta kondisi sosial ekonomi di masing-masing kecamatan.

Data migrasi penduduk Kabupaten Boalemo selama periode 2021–2025 menunjukkan dinamika pergerakan penduduk yang cukup fluktuatif, baik pada migrasi masuk maupun migrasi keluar. Secara umum, jumlah migrasi keluar cenderung lebih tinggi dibandingkan migrasi masuk, sehingga kabupaten ini mengalami migrasi netto negatif selama lima tahun terakhir.

Tabel 7.

Migrasi Penduduk Kabupaten Boalemo 2021-2024

No.	Jenis Migrasi	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1.	Migrasi Masuk (orang)	2125	2529	2257	2131
2.	Migrasi Keluar (orang)	2267	2820	2723	2510

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, 2025

KABAG HUKUM	DINAS KANTOR	AS	SEKDA	WABUP
				

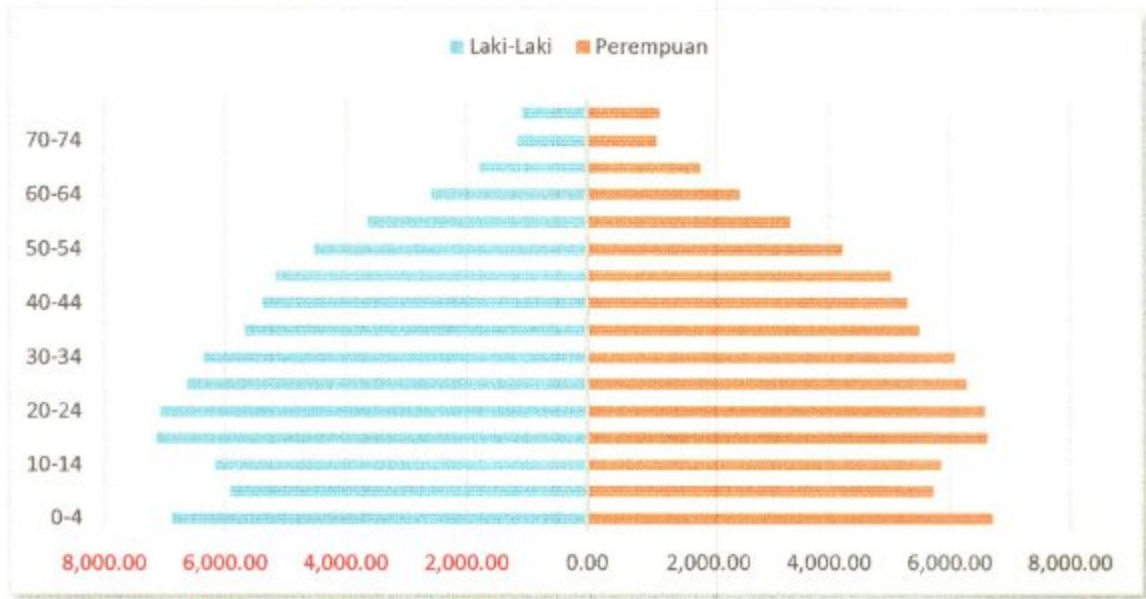
Pada migrasi masuk, jumlah tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan 2.529 orang, sebelum mengalami penurunan menjadi 2.257 orang pada 2023, lalu kembali turun tipis menjadi 2.131 orang pada 2024.. Pola ini menunjukkan adanya dinamika ekonomi dan sosial yang dapat memengaruhi daya tarik daerah bagi pendatang.

Pada sisi lain, migrasi keluar memperlihatkan angka yang lebih besar setiap tahun dibanding migrasi masuk. Jumlah tertinggi terlihat pada 2022 dengan 2.820 orang dan kembali mendekati angka tersebut pada 2025 yaitu 2.816 orang. Walaupun sempat menurun pada 2024 menjadi 2.510 orang, tren keseluruhan menunjukkan kecenderungan peningkatan mobilitas penduduk keluar daerah.

Kondisi ini menyebabkan Kabupaten Boalemo terus mengalami arus keluar penduduk yang lebih besar daripada arus masuk, yang berpotensi mempengaruhi dinamika demografi, struktur umur, dan potensi ekonomi daerah.

e. Piramida Penduduk

Piramida penduduk Kabupaten Boalemo tahun 2024 menunjukkan struktur penduduk yang masih relatif muda (expansive pyramid), ditandai dengan besarnya jumlah penduduk pada kelompok umur 0–4, 5–9, dan 10–14 tahun. Basis piramida yang lebar ini menggambarkan bahwa angka kelahiran masih cukup signifikan dan sejalan dengan tren fluktuatif kelahiran yang sebelumnya telah diuraikan. Kelompok usia muda ini menjadi potensi besar bagi Boalemo dalam menghadapi periode bonus demografi, asalkan mampu diikuti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan sejak usia dini.



Grafik 7. Piramida Penduduk Kabupaten Boalemo, 2024

Sumber: BPS Kabupaten Boalemo, 2025

KABAG HUKUM	DINASBAGASI KANTOR	ASS	SEKDA	WASUP

Pada kelompok usia produktif (15–64 tahun), piramida menunjukkan dominasi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang relatif seimbang, dengan kelompok usia 15–19, 20–24, dan 25–29 sebagai kelompok terbesar. Dominasi kelompok usia produktif ini menguatkan hasil analisis sebelumnya bahwa kualitas tenaga kerja Boalemo menjadi faktor penentu dalam pembangunan daerah. Namun, potensi ini harus dikelola dengan baik melalui peningkatan akses pendidikan menengah dan tinggi, perluasan pelatihan vokasi, serta penciptaan lapangan kerja yang memadai agar populasi produktif tidak berubah menjadi beban ketenagakerjaan.

Pada bagian atas piramida, jumlah penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) mulai menunjukkan peningkatan meski masih relatif kecil. Hal ini menandakan mulai terbentuknya tren penuaan penduduk yang perlu diantisipasi melalui penyediaan layanan kesehatan lansia, jaminan sosial, dan dukungan keluarga. Kenaikan kelompok lansia yang stabil sejalan dengan meningkatnya angka harapan hidup yang didorong oleh perbaikan layanan kesehatan dasar, sebagaimana tercermin dalam data IPM dan pencapaian sektor kesehatan pada analisis sebelumnya.

Secara keseluruhan, piramida penduduk Boalemo menggambarkan struktur populasi yang masih didominasi oleh kelompok usia muda dan usia produktif, sebuah kondisi yang memberikan peluang besar bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Namun, peluang ini hanya dapat dimaksimalkan jika pemerintah daerah mampu memperbaiki kualitas penduduk melalui pendidikan, kesehatan, dan penguatan keluarga, serta menata persebaran penduduk agar sesuai dengan daya dukung wilayah. Dengan demikian, piramida penduduk 2024 tidak hanya memotret kondisi demografis saat ini, tetapi juga menjadi indikator penting dalam merancang kebijakan pembangunan kependudukan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

2. Peningkatan Kualitas Penduduk

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan indeks yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Komponen pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggunakan 4 indikator yaitu Usia Harapan Hidup saat Lahir, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Riil per Kapita.

KABAG HUKUM	DINASISDAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

Tabel 8.

**Indikator Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Boalemo Tahun
2020-2024**

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Usia Harapan Hidup (UHH) saat Lahir	Tahun	70,41	70,64	70,94	71,24	71,43
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,44	12,45	12,46	12,48	12,49
3	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	6,82	7,00	7,03	7,30	7,31
4	Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	Ribu Rupiah /Tahun	8.789	8.940	9.543	9.941	10.401
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Poin	66,50	67,02	67,86	68,78	69,34

Sumber : BPS Kabupaten Boalemo, 2025

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Boalemo menunjukkan tren meningkat secara konsisten sepanjang 2020–2024. Nilainya naik dari 66,50 pada tahun 2020 menjadi 69,34 pada 2024. Kenaikan hampir 3 poin dalam lima tahun ini mengisyaratkan perbaikan bertahap dalam kualitas hidup penduduk Boalemo—baik dari sisi kesehatan, pendidikan, maupun kapasitas ekonomi rumah tangga. Secara kategori, IPM Boalemo masih berada pada level “sedang” dan belum masuk kelompok tinggi, tetapi arah pergerakan yang terus naik memberi sinyal bahwa pembangunan manusia bergerak ke arah yang benar dan perlu dipertahankan akselerasinya.

Dilihat sebagai gambaran kualitas penduduk, tren IPM ini menunjukkan bahwa masyarakat Boalemo makin memiliki peluang hidup lebih panjang, lebih berpendidikan, dan memiliki daya beli yang pelan-pelan membaik. Namun, posisi IPM yang masih di bawah rata-rata nasional dan provinsi (yang umumnya sudah mendekati kategori “tinggi”) mengingatkan bahwa kualitas penduduk Boalemo masih menghadapi

KABAG HUKUM	DINASBIDAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

tantangan serius: ketimpangan akses layanan dasar antar kecamatan, kemiskinan yang relatif tinggi, serta keterbatasan keterampilan kerja. Artinya, peningkatan IPM belum boleh dianggap sebagai “selesai”, melainkan sebagai dasar untuk mendorong kebijakan yang lebih agresif dalam memperkuat kualitas SDM—melalui penguatan layanan kesehatan, pemerataan pendidikan, dan penciptaan peluang ekonomi produktif—agar penduduk Boalemo benar-benar mampu menjadi motor penggerak pembangunan daerah, bukan hanya penerima manfaatnya.

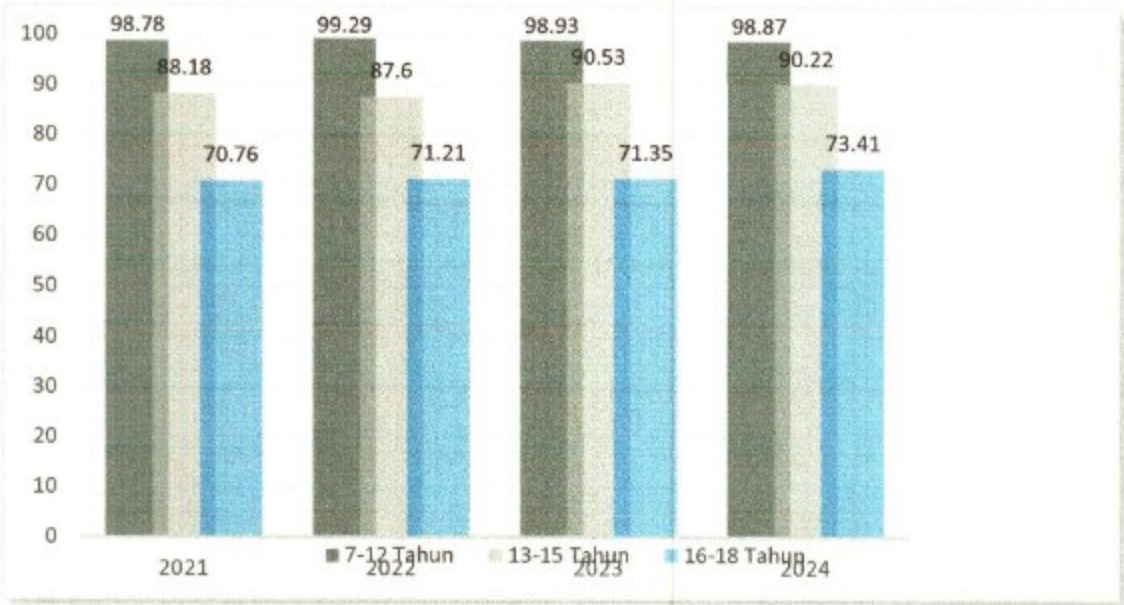
b. Kondisi Pendidikan

1) Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian.

Grafik 8.

Angka partisipasi sekolah (APS) Kabupaten Boalemo Tahun 2021-2023



Sumber: BPS Kabupaten Boalemo, 2024

Capaian APS Kabupaten Boalemo pada tahun 2021-2023 untuk kelompok umum 7-12 tahun terjadi fluktuasi dengan kondisi di tahun 2022 naik dibanding tahun 2021 tapi turun di tahun 2023, untuk kelompok umur 13-15 tahun capaian APS tahun 2023 naik dibanding 2 tahun sebelumnya dan untuk kelompok umur 16-18 tahun capaian APS mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 terjadi penurunan APS pada kelompok umur 7-12 yaitu menjadi 98.87 dan juga pada kelompok umur 13-15 yaitu 90.22. Namun peningkatan terjadi pada kelompok umur 16-18 tahun menjadi 73.41.

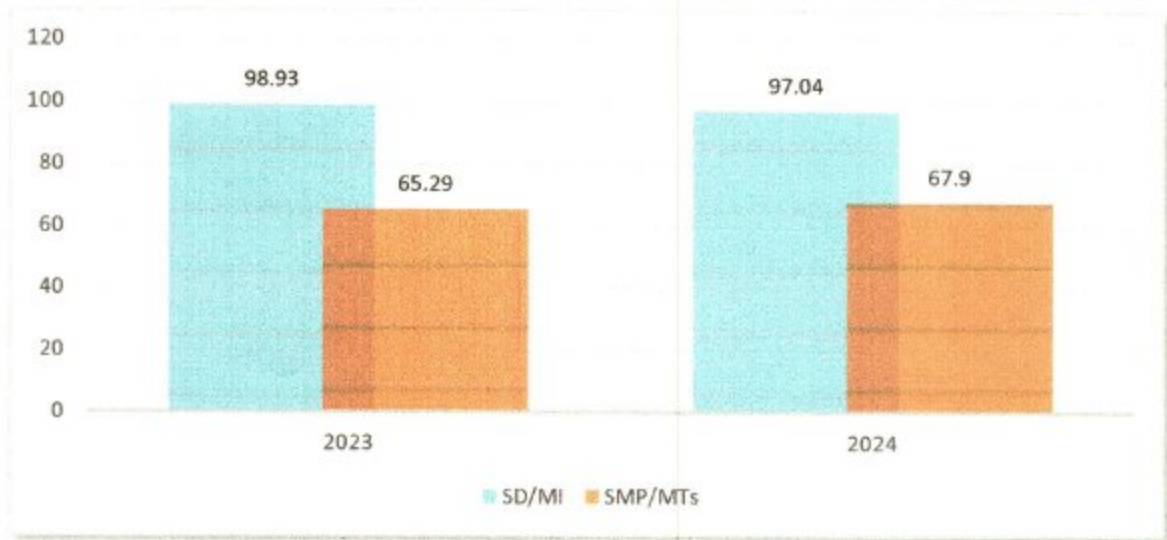
KABAG HUKUM	DINAS/SDM KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

2) Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian.

Grafik 9

Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2024



Sumber: BPS Kabupaten Boalemo, 2024

Grafik Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Boalemo tahun 2023-2024 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan pada jenjang SD/MI berada pada kategori sangat tinggi, meskipun mengalami sedikit penurunan dari 98,93% pada tahun 2023 menjadi 97,04% pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa hampir seluruh anak usia sekolah dasar di Kabupaten Boalemo telah terlayani dalam sistem pendidikan formal.

Sementara itu, APM pada jenjang SMP/MTs menunjukkan tren peningkatan, dari 65,29% pada tahun 2023 menjadi 67,90% pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan akses dan keberlanjutan pendidikan pada jenjang menengah pertama, meskipun capaian APM SMP/MTs masih perlu terus ditingkatkan untuk mendekati pemerataan pendidikan dasar secara menyeluruh.

3) Angka Partisipasi Kasar

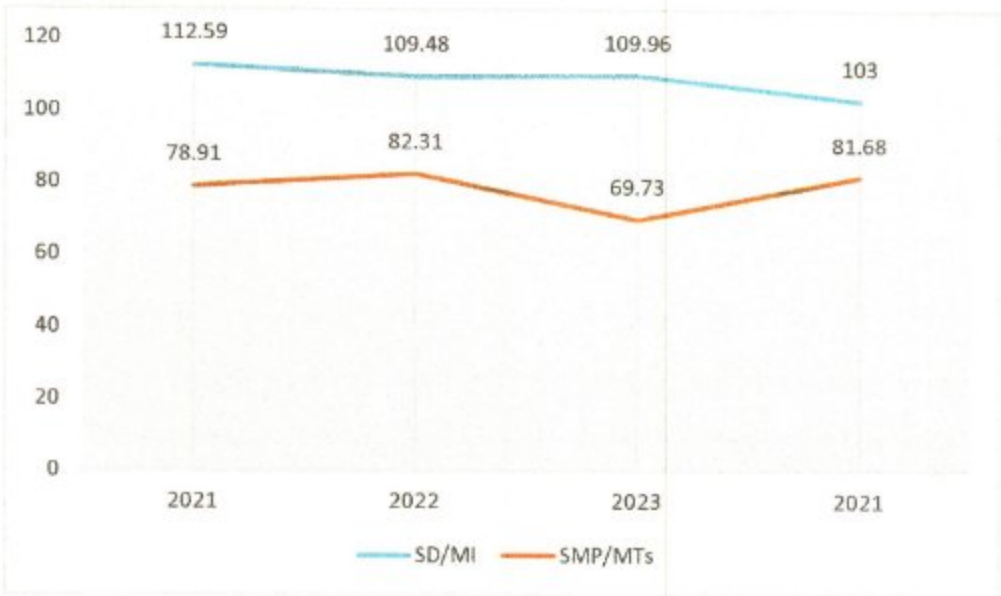
Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Grafik ini menyajikan perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan PAUD, SD/MI, dan SMP/MTs di Kabupaten Boalemo selama periode 2021 hingga 2024. APK menggambarkan tingkat

KABAG HUKUM	DINAS KEMENTERIAN	ASS	SEKDA	WABUP

keterlibatan penduduk usia sekolah dalam proses pendidikan formal, sehingga menjadi indikator penting dalam menilai akses dan pemerataan pendidikan di daerah.

Grafik 10

Angka Partisipasi Kasar SD/MI dan SMP/MTs, 2021 – 2024



Sumber: BPS Kabupaten Boalemo, 2025

Grafik Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI, dan SMP/MTs Kabupaten Boalemo tahun 2021–2024 menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan pada jenjang SD/MI berada pada tingkat sangat tinggi, meskipun mengalami kecenderungan menurun. Nilai APK SD/MI tercatat sebesar 112,59 pada tahun 2021, menurun menjadi 109,48 pada tahun 2022, relatif stabil pada 109,96 pada tahun 2023, dan kembali turun menjadi 103,00 pada tahun 2024. Angka di atas 100 menunjukkan adanya partisipasi siswa di luar kelompok usia resmi, yang masih cukup signifikan.

Sementara itu, APK pada jenjang SMP/MTs menunjukkan fluktuasi selama periode pengamatan. Pada tahun 2021, APK SMP/MTs sebesar 78,91, meningkat menjadi 82,31 pada tahun 2022, kemudian menurun cukup tajam pada 69,73 tahun 2023, sebelum kembali meningkat menjadi 81,68 pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun akses pendidikan menengah pertama terus diupayakan, keberlanjutan dan stabilitas partisipasi peserta didik masih memerlukan perhatian melalui penguatan transisi dari jenjang SD ke SMP serta pencegahan putus sekolah.

KABAG HUKUM	DINASBAND KANTOR	ASB	SEKDA	WABUP

4) Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Boalemo tahun 2024 adalah 12,49 tahun artinya Penduduk Kabupaten Boalemo diharapkan menamatkan Pendidikan sampai SMA/SMK/MA Pendidikan 12 tahun hingga menempuh pendidikan kuliah sekitar 5 Bulan.

Grafik 11.

Angka Harapan Sekolah Kabupaten Boalemo Tahun 2020 - 2024



Sumber: BPS Kabupaten Boalemo, 2025

5) Jumlah Sekolah, Guru Dan Murid

Kualitas tingkat pendidikan di Kabupaten Boalemo dipengaruhi oleh Jumlah sekolah, murid dan guru. Tabel berikut ini merupakan jumlah sekolah, murid dan guru pada setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Boalemo pada tahun 2024.

Tabel 9.

Jumlah Sekolah dan Guru Pendidikan Dasar setiap Kecamatan di Kabupaten Boalemo Tahun 2024

No	Kecamatan	TK/PAUD/RA		SD/MI		SMP/MTs	
		Jumlah Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru
1	Mananggu	14	40	14	121	5	70
2	Tilamuta	22	91	21	253	8	176
3	Dulupi	12	49	21	183	10	118
4	Botumoito	11	40	16	140	7	88

KASAG HUKUM	DINASISDA KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

5	Paguyaman	34	118	33	324	15	196
6	Wonosari	19	82	32	274	15	160
7	Paguyaman Pantai	6	22	11	91	6	63
Jumlah		118	442	148	1386	66	871

Sumber: BPS Kabupaten Boalemo, 2025

Tabel ini menunjukkan persebaran satuan pendidikan dan tenaga pendidik jenjang pendidikan dasar di seluruh kecamatan Kabupaten Boalemo pada tahun 2024. Secara keseluruhan, terdapat 118 sekolah TK/PAUD/RA dengan 442 guru, 148 sekolah SD/MI dengan 1.386 guru, serta 66 sekolah SMP/MTs dengan 871 guru.

Kecamatan Paguyaman dan Wonosari merupakan wilayah dengan jumlah sekolah dan guru terbanyak, khususnya pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs, yang mencerminkan besarnya kebutuhan layanan pendidikan dasar di wilayah tersebut. Sementara itu, kecamatan seperti Paguyaman Pantai dan Mananggu memiliki jumlah sekolah dan guru yang relatif lebih sedikit, sejalan dengan kondisi jumlah penduduk dan sebaran wilayahnya.

Secara umum, data ini menggambarkan bahwa ketersediaan sekolah dan guru pendidikan dasar di Kabupaten Boalemo telah tersebar di seluruh kecamatan, namun masih diperlukan pemerataan dan penguatan kualitas tenaga pendidik untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Tabel 10.

**Rasio Guru dan Murid Pendidikan Dasar di Kabupaten Boalemo
Tahun 2024**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid-Guru	Jumlah Sekolah
1	PAUD/TK/RA	3.820	422	9:1	118
2	SD/MI	14.907	1.386	11:1	148
3	SMP/MTs	6.481	871	7:1	66

Sumber: BPS Kabupaten Boalemo, 2025

Tabel ini menggambarkan kondisi ketersediaan guru dibandingkan dengan jumlah murid pada setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Boalemo tahun 2024. Pada jenjang PAUD/TK/RA, terdapat 3.820 murid

KABAG HUKUM	DINASBIDAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

dan 422 guru dengan rasio 9 murid per 1 guru, yang menunjukkan intensitas pendampingan belajar relatif baik bagi anak usia dini. Pada jenjang SD/MI, jumlah murid mencapai 14.907 orang dengan 1.386 guru, menghasilkan rasio 11:1, yang masih tergolong ideal untuk mendukung proses pembelajaran di pendidikan dasar. Sementara itu, jenjang SMP/MTs memiliki 6.481 murid dan 871 guru dengan rasio 7:1, yang mencerminkan ketersediaan guru yang cukup memadai untuk pembelajaran yang lebih intensif.

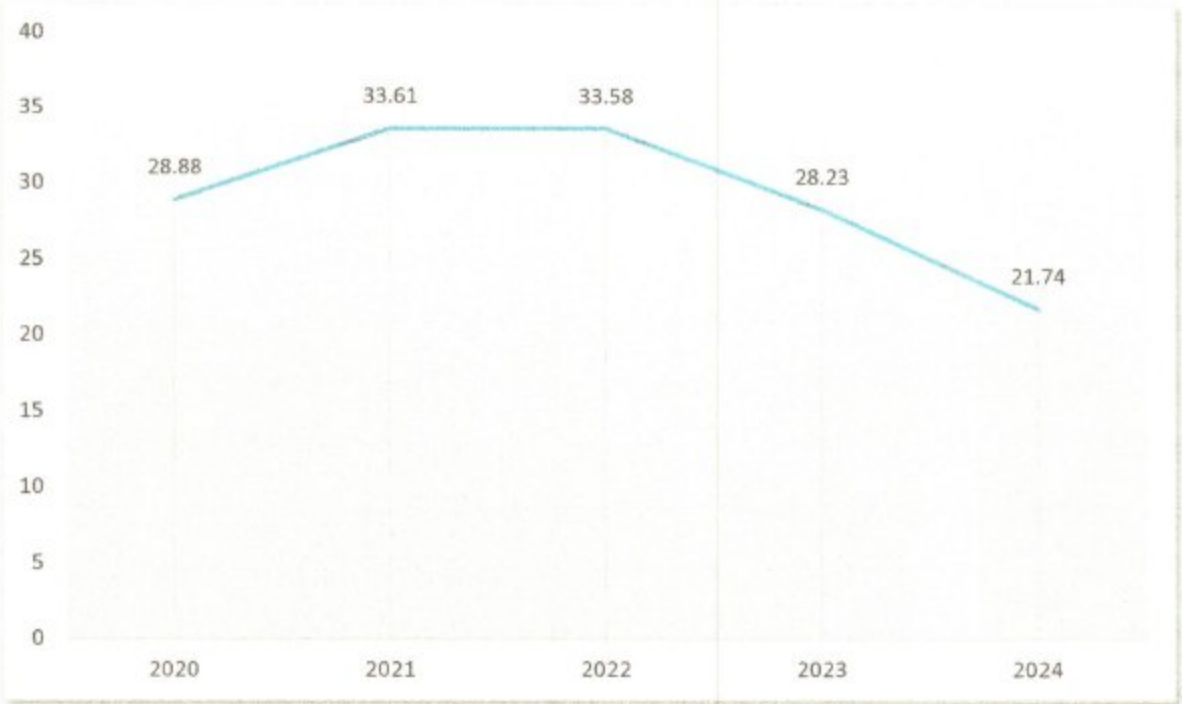
Secara keseluruhan, rasio murid-guru di Kabupaten Boalemo pada tahun 2024 menunjukkan kondisi yang relatif baik dan mendukung peningkatan mutu pendidikan, meskipun pemerataan distribusi guru antarwilayah dan antartenjang tetap perlu menjadi perhatian.

6) Angka Partisipasi Kuliah

Angka Partisipasi Kasas Perguruan Tinggi menggambarkan proporsi penduduk usia perguruan tinggi yang sedang mengikuti pendidikan tinggi, sehingga menjadi indikator penting dalam melihat akses, minat, serta kemampuan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kondisi APK Perguruan Tinggi Kabupaten Boalemo dalam 5 tahun terakhir terlihat pada grafik berikut.

Grafik 12.

Angka Partisipasi Kuliah Kabupaten Boalemo Tahun, 2020 - 2024



Sumber: BPS Kabupaten Boalemo, 2025

Grafik di atas menunjukkan bahwa APK Kuliah Kabupaten Boalemo mengalami pola naik-turun selama lima tahun terakhir. Pada 2020, tingkat

KABAG HUKUM	DINASISDAN KANTOR	ASE	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

partisipasi kuliah berada pada angka 28,88 persen, kemudian meningkat signifikan pada 2021 menjadi 33,61 persen, yang sekaligus menjadi puncak tertinggi dalam periode ini. Angka tersebut sedikit stabil pada 2022 dengan nilai 33,58 persen, menunjukkan bahwa minat untuk melanjutkan studi tinggi masih cukup kuat.

Namun, memasuki 2023 terjadi penurunan cukup tajam menjadi 28,23 persen, dan tren penurunan ini berlanjut pada 2024 hingga mencapai 21,74 persen, level terendah dalam lima tahun. Penurunan ini dapat mengindikasikan berbagai tantangan seperti keterbatasan ekonomi keluarga, akses pendidikan tinggi yang terbatas, minimnya fasilitas penunjang, atau berkurangnya motivasi melanjutkan studi bagi generasi muda.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa meski partisipasi kuliah sempat meningkat, tetapi ketidakstabilan dan penurunan pada tiga tahun terakhir perlu mendapat perhatian melalui penguatan kebijakan bantuan pendidikan, perluasan akses perguruan tinggi, serta peningkatan literasi pentingnya pendidikan tinggi bagi masa depan generasi muda Boalemo.

c. Kondisi Kesehatan

Kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan Salah satu faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Tujuan penyelenggaraan urusan kesehatan antara lain untuk meningkatkan aksesibilitas, pemerataan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat, menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular, meningkatkan kesadaran keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat terutama pada ibu hamil, bayi, balita, dan usia produktif, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

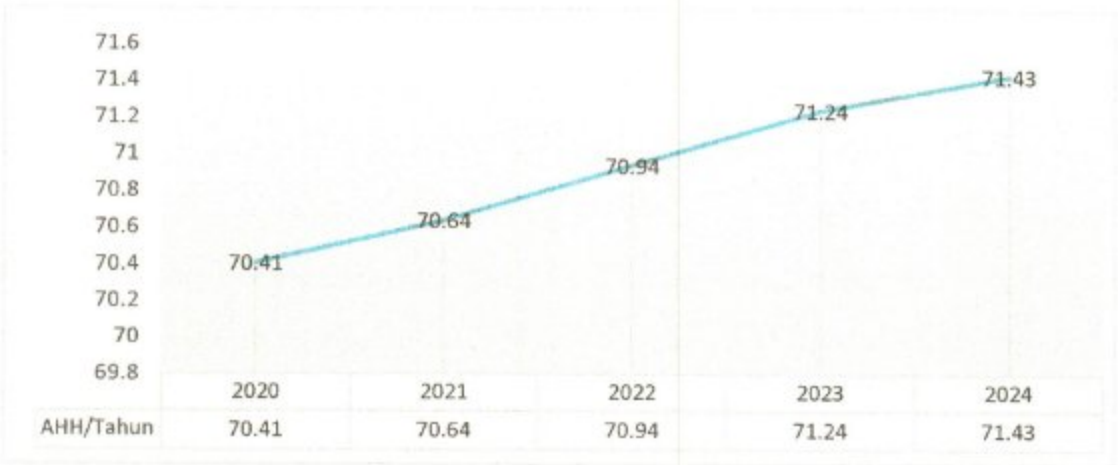
1) Usia Harapan Hidup

Capaian Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 2024 dalam hal ini yang diukur adalah Umur Harapan Hidup saat lahir yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Boalemo yaitu 71,43 tahun. Kenaikan usia harapan hidup saat lahir ini secara tidak langsung menggambarkan telah terjadi perbaikan dari system pelayanan, perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan Kesehatan yang dilakukan secara terus menerus. Data perkembangan Usia

Harapan Hidup dari tahun sebelumnya sampai saat ini, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 13

Usia Harapan Hidup di Kabupaten Boalemo Tahun 2020-2024



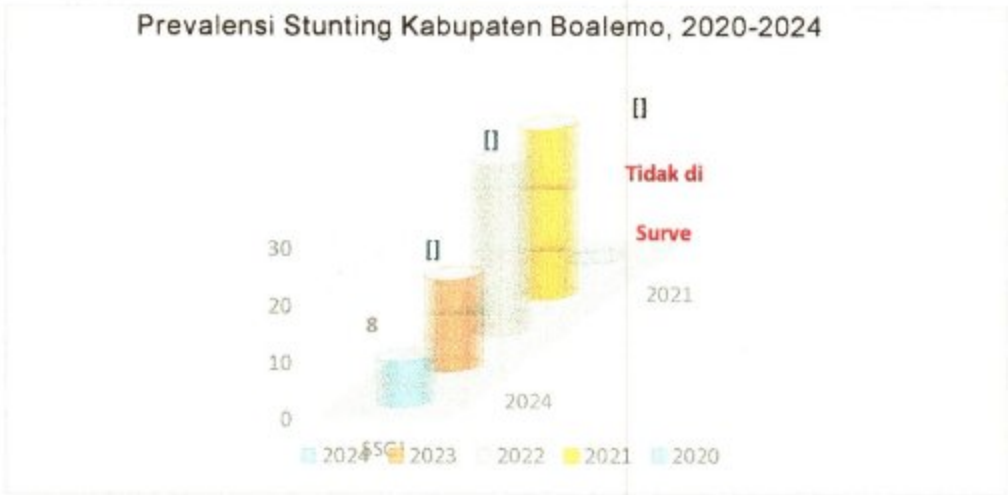
Sumber: BPS Kabupaten Boalemo, 2025

2) Prevalensi Stunting

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang ditandai dengan tubuh pendek. Penderita *stunting* umumnya rentan terhadap penyakit, memiliki tingkat kecerdasan di bawah normal serta produktivitas rendah.

Grafik 14.

Presentase Stunting pada Balita di Kabupaten Boalemo Berdasarkan SSGI Tahun 2020 – 2024



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo, 2025

Tingginya prevalensi *stunting* dalam jangka panjang akan berdampak pada kerugian ekonomi bagi masyarakat, Gambaran perkembangan Persentase Stunting di Kabupaten Boalemo Tahun 2019 – 2024. grafik 14 menunjukkan bahwa Persentase *Stunting* di Kabupaten Boalemo tahun 2020-2024 mengalami penurunan, Kabupaten Boalemo di Tahun 2024 mampu menurunkan angka stunting terbesar di Provinsi Gorontalo menjadi 8% jauh dari capaian Nasional yang masih diangka 19,8%.

KABAG HUKUM	DINAS KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
☒	☒	☒	☒	☒

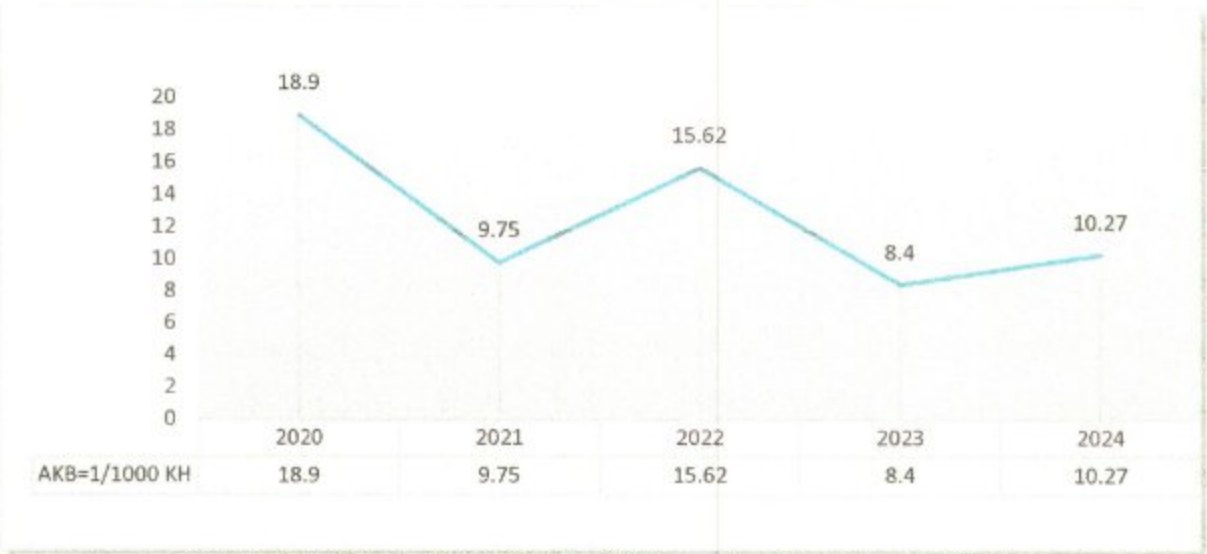
Penyebab dari *stunting* adalah rendahnya asupan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan, yakni sejak janin hingga bayi umur dua tahun. Selain itu, buruknya fasilitas sanitasi, minimnya akses air bersih, dan kurangnya kebersihan lingkungan juga menjadi penyebab *stunting*

3) Angka Kematian Bayi (/1.000 KH)

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah Banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama, AKB terutama terjadi pada umur 0-28 hari, yang sangat dipengaruhi oleh kondisi ibu pada saat hamil, bersalin dan perawatan bayi baru lahir.

Grafik 15

Angka Kematian Bayi di Kabupaten Boalemo Tahun 2020 – 2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo, 2025

Capaian Angka Kematian Bayi mengalami penurunan (positif) dimana pada tahun 2023 capaiannya 8,4 per 1.000 kelahiran hidup sedangkan pada tahun 2022 mencapai 15,62 per 1.000 kelahiran hidup. Namun di tahun 2024 mengalami peningkatan (negatif) angka kematian bayi mencapai 10,27 per 1.000 kelahiran hidup. Adapun pencapaian dari tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

4) Angka Kematian Ibu (/100.000 KH)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

KADAG HUKUM	DINAS KES KANTOR	ASB	SEKDA	WABUP

Grafik 16

Angka Kematian Ibu di Kabupaten Boalemo Tahun 2020 - 2024



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo, Tahun 2025

Capaian Angka Kematian Ibu Tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Angka kematian Ibu tahun 2024 di angka 78,99 per 100.000 Kelahiran Hidup dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu 110,6 per 100.000 kelahiran Hidup. Namun hal ini belum mencapai target capaian indikator sasaran yaitu 70 AKI.

Jumlah kelahiran hidup di Kabupaten Boalemo selama lima tahun terakhir mengalami dinamika yang dapat berdampak langsung terhadap perhitungan dan interpretasi angka kematian ibu (AKI). Pada tahun 2020, kelahiran hidup tercatat sebanyak 2.594 jiwa, kemudian menurun menjadi 2.462 jiwa pada tahun 2021. Tren ini berbalik pada tahun 2022 dengan peningkatan menjadi 2.625 jiwa dan terus naik hingga mencapai 2.712 jiwa pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan kembali menjadi 2.532 jiwa.

Perubahan jumlah kelahiran ini penting untuk dicermati karena secara metodologis, AKI dihitung berdasarkan jumlah kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, sehingga fluktuasi angka kelahiran secara langsung akan mempengaruhi nilai akhir AKI. Dalam konteks ini, penurunan jumlah kelahiran hidup pada tahun-tahun tertentu dapat menyebabkan nilai AKI terlihat lebih tinggi meskipun jumlah kematian ibu tetap, sementara peningkatan jumlah kelahiran dapat menurunkan rasio AKI secara statistik. Oleh karena itu, pemahaman terhadap tren angka kelahiran sangat penting dalam mengevaluasi efektivitas intervensi pelayanan kesehatan ibu serta dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam upaya menekan angka kematian ibu di Kabupaten Boalemo.

KABAG HUKUM	DINASAGAM KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

5) Angka Kesakitan (Mordibitas)

Angka Kesakitan/Morbiditas/Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan merupakan suatu indikator untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu, salah satu Indikator angka kesakitan / Morbiditas yaitu TBC, HIV/AIDS, Malaria dan penyakit Demam Berdarah (DBD), jumlah penemuan kasus yang terjadi selang tahun 2022 sampai tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11.

Jumlah Penemuan Kasus TBC,HIV/AIDS,Malaria,DBD
di Kabupaten Boalemo Tahun 2022 – 2024

No	Kategori	Tahun		
		2022	2023	2024
1	TBC	334	344	407
2	HIV/AIDS	16	18	21
3	Malaria	0	504	344
4	DBD	106	108	435
Total		444	974	1.207

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo, 2025

Tabel di atas menunjukkan dinamika penemuan kasus empat penyakit menular utama di Kabupaten Boalemo selama periode 2022–2024. Secara umum, jumlah total kasus menunjukkan tren meningkat signifikan, dari 444 kasus pada 2022, menjadi 974 kasus pada 2023, dan mencapai 1.207 kasus pada 2024. Kenaikan ini dapat dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas surveilans, cakupan deteksi dini, serta kemungkinan peningkatan kasus aktual di masyarakat.

Kasus TBC menunjukkan tren naik stabil, dari 334 kasus pada 2022 menjadi 407 kasus pada 2024, menandakan beban penyakit yang masih cukup tinggi. Kasus HIV/AIDS juga meningkat meskipun angkanya relatif kecil, dari 16 kasus pada 2022 menjadi 21 kasus pada 2024. Peningkatan paling signifikan terjadi pada Malaria dan DBD. Kasus malaria melonjak dari 0 kasus pada 2022 menjadi 504 kasus pada 2023, kemudian menurun menjadi 344 kasus pada 2024, menunjukkan adanya kejadian luar biasa (KLB) maupun peningkatan deteksi pada 2023. Sementara itu, DBD meningkat tajam pada 2024, dari 108 kasus pada 2023 menjadi 435 kasus,

yang mengindikasikan potensi tingginya faktor risiko seperti perubahan iklim, kepadatan vektor, dan kondisi lingkungan.

Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan sistem kewaspadaan dini, pengendalian penyakit menular, dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) untuk menekan laju peningkatan kasus di tahun-tahun mendatang.

d. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Periode tahun 2020-2024 menunjukkan angka kemiskinan di Kabupaten Boalemo mengalami penurunan (tren positif), pada periode tersebut penurunan terjadi sebesar 0,74 persen dari yang sebelumnya tahun 2020 berada pada angka 18,57 persen turun menjadi 17,83 persen pada tahun 2024.

Tabel 12.

Kemiskinan di Kabupaten Boalemo Tahun 2020 – 2024

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	Persentase Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan (Rp Perkapita per bulan)
2020	31.63	18.57	426.961.00
2021	31.83	19.00	450.724.00
2022	31.97	18.74	472.906.00
2023	31.94	18.38	525.007.00
2024	31.53	17,83	551.189.00

Sumber : BPS Kabupaten Boalemo, 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa perkembangan kemiskinan di Kabupaten Boalemo selama periode 2020 hingga 2024 cenderung stabil, namun menunjukkan tren sedikit menurun pada dua tahun terakhir. Pada 2020 jumlah penduduk miskin Kabupaten Boalemo adalah sebesar 31,63 ribu jiwa, sempat mengalami peningkatan pada 2021 menjadi 31,83 ribu jiwa, angkanya kembali turun hingga mencapai 31,53 ribu jiwa pada 2024.

KABAG HUPIM	DINASRAN KANTOR	ASB	SEKDA	WABUP
				

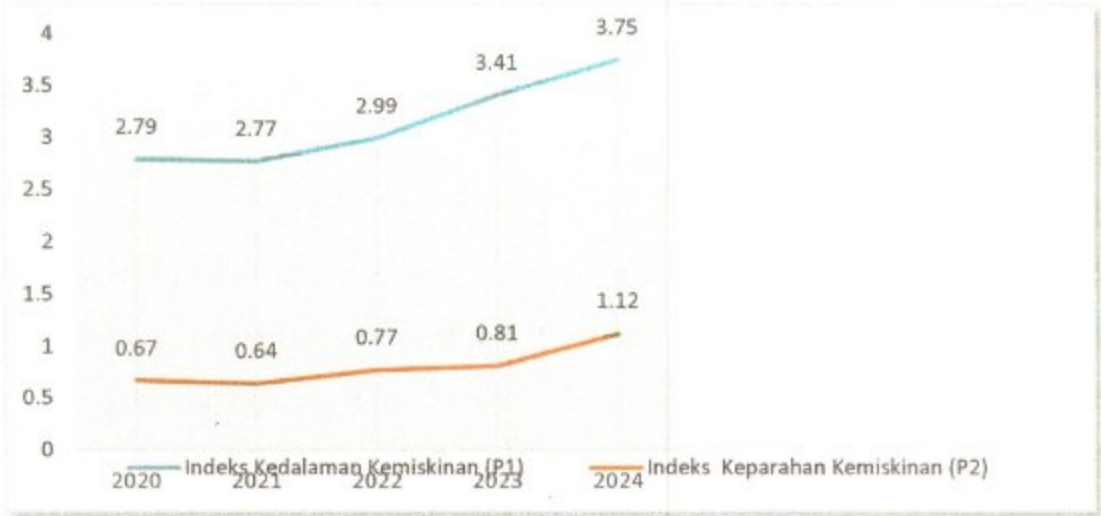
Persentase penduduk miskin juga mengalami penurunan bertahap dari 18,57 persen pada 2020 menjadi 17,83 persen pada 2024. Tren ini menggambarkan adanya perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat meskipun pergerakannya relatif lambat.

Jika dilihat dari garis kemiskinan, terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari Rp 426.961 per kapita per bulan pada 2020 menjadi Rp 551.189 per kapita per bulan pada 2024. Kenaikan garis kemiskinan ini menunjukkan meningkatnya kebutuhan minimum biaya hidup yang harus dipenuhi masyarakat, sekaligus mencerminkan tekanan inflasi dan kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Untuk itu, penurunan proporsional dalam persentase penduduk miskin meskipun jumlah absolutnya tidak berubah drastis. Namun, kenaikan garis kemiskinan menandakan perlunya penguatan program perlindungan sosial, peningkatan kesempatan kerja, dan pengendalian inflasi agar penurunan kemiskinan dapat berlangsung lebih cepat dan berkelanjutan.

Jika dilihat dari perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Boalemo selama periode 2020–2024, kedua indikator memperlihatkan tren meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan adanya tantangan dalam memperbaiki kesejahteraan kelompok masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.

Grafik 17

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Boalemo Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Boalemo, 2025

Indeks P1 meningkat dari 2,79 pada 2020 menjadi 3,75 pada 2024, yang berarti rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin melebar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun

KASIAG MURUNG	DINASISDAAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

jumlah penduduk miskin tidak bertambah signifikan, tingkat keterpurukan ekonomi mereka semakin dalam. Sedangkan Indeks P2 sebagai indikator ketimpangan antar penduduk miskin juga mengalami kenaikan dari 0,67 pada 2020 menjadi 1,12 pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara rumah tangga miskin semakin besar, sehingga sebagian kelompok miskin berada dalam kondisi yang jauh lebih sulit dibanding kelompok lainnya.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa penurunan jumlah penduduk miskin belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Semakin meningkatnya P1 dan P2 menegaskan perlunya kebijakan yang lebih terarah, seperti peningkatan program pemberdayaan ekonomi, perlindungan sosial yang tepat sasaran, dan intervensi untuk mengurangi ketimpangan antar rumah tangga miskin.

e. Kondisi Ketenagakerjaan

1) Angkatan Kerja Kabupaten Boalemo

Struktur penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) Kabupaten Boalemo pada tahun 2024 menunjukkan gambaran mengenai kondisi ketenagakerjaan dan aktivitas penduduk dalam satu minggu terakhir. Dari total 115.869 jiwa penduduk usia kerja, terdapat 80.624 orang (69,6%) yang termasuk kategori angkatan kerja, yaitu mereka yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan.

Tabel 13.

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin Kabupaten Boalemo, 2024

Jenis Kegiatan (Activity)	Laki-laki (Male)	Perempuan (Female)	Laki-laki + Perempuan (Male + Female)
Angkatan Kerja	49.847	30.777	80.624
Bekerja	48.595	29.559	78.154
Pengangguran	1.252	1.218	2.470
Bukan Angkatan Kerja	9.214	26.031	35.245
Sekolah	3.945	5.015	8.960
Mengurus Rumah Tangga	2.191	18.704	20.895

KABAG HUKUM	DINASBAG KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

Lainnya	3.078	2.312	5.390
Jumlah (Total)	59.061	56.808	115.869

Sumber: BPS Kabupaten Boalemo, 2025

Angkatan kerja Kabupaten Boalemo cukup tinggi dengan TPAK 69,6%. Tingkat pengangguran rendah (3,06%), menggambarkan ketersediaan pekerjaan relatif mencukupi. Ada ketimpangan gender dalam peran ekonomi, di mana perempuan lebih banyak berada di ranah domestik. Komposisi pekerja menunjukkan dominasi laki-laki, namun perempuan juga berperan penting meski lebih sedikit dalam jumlah. enduduk bukan angkatan kerja cukup besar (30,4%), mayoritas adalah perempuan.

2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan merupakan salah satu bentuk keterlibatan perempuan dalam ekonomi aktif, perempuan yang memutuskan bekerja mengindikasikan peningkatan peran perempuan dalam bidang ketenagakerjaan. Kesetaraan gender menjadi hal utama dalam memajukan peran perempuan dalam pembangunan. Salah satu keberhasilan pembangunan sumber daya manusia di suatu daerah salah satunya karena ada peningkatan peran perempuan dalam bidang ketenagakerjaan.

Grafik 18

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Kabupaten Boalemo, 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Boalemo, 2025

Kondisi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan di Kabupaten Boalemo Pada tahun 2020 berada pada angka 54,13 persen.

KAB. BOALEMO	DINAS EKONOMI	ASS	SEKDA	WABUP

tahun 2021 berada pada angka 48,01 persen, tahun 2022 berada pada angka 57,03 persen, tahun 2023 berada pada angka 56,45 persen, tahun 2024 berada pada angka 54,18 persen.

Melihat kondisi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Kabupaten Boalemo pada tahun 2024 yang berada pada angka 54,18 persen, dapat diartikan bahwa pada tahun 2024 dari 100 orang penduduk usia kerja perempuan yang ada di Kabupaten Boalemo hanya sekitar 54 orang yang termasuk angkatan kerja.

3) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, **TPT** menjadi salah satu indikator yang bisa digunakan untuk mengetahui perkembangan angka pengangguran.

Grafik 19

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Boalemo Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Boalemo, 2025

TPP Kabupaten Boalemo sejak 2020-2024 **TPT menunjukkan angka yang fluktuatif, dimana pada tahun 2020 TPT Kabupaten Boalemo berada pada angka 3,66 persen menurun sebanyak 0,60 persen menjadi 3,06 persen pada tahun 2024, penurunan angka TPT paling rendah (membaik) terjadi pada tahun 2022 yaitu berada pada angka 2,07 persen, sementara kenaikan TPT paling tinggi terjadi pada tahun 2020 berada pada angka 3,66 persen** hal ini diakibatkan oleh adanya Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan banyak orang kehilangan pekerjaannya mengingat adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membatasi kontak langsung antara manusia

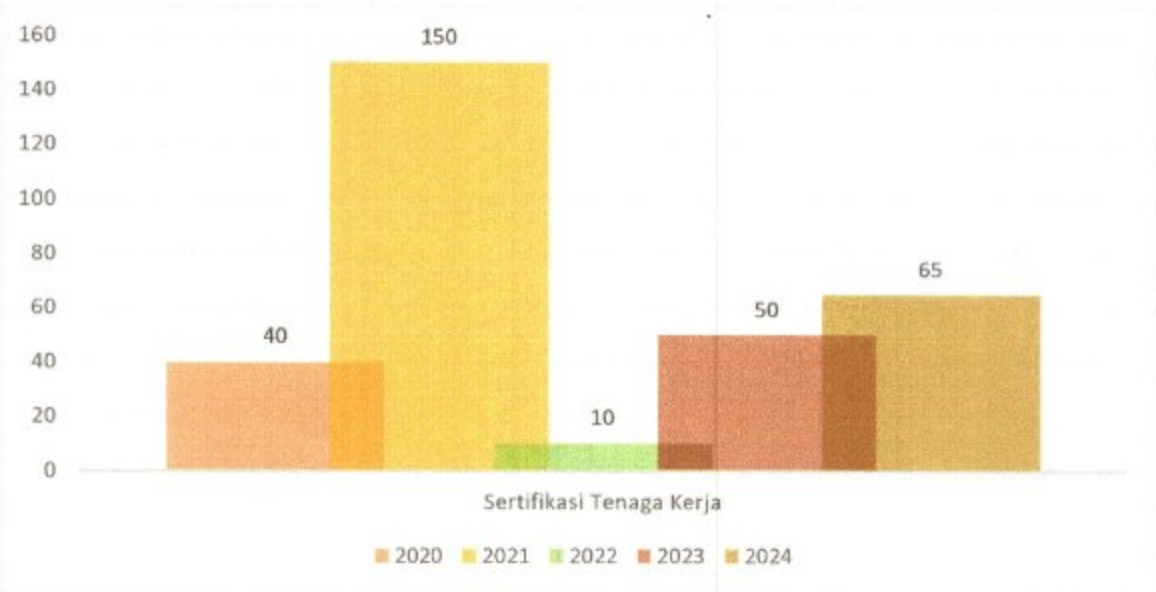
KABAG HUKUM	DINASISDAK KANTEN	ASS	SEKDA	KABUP

4) Sertifikasi Tenaga Kerja

Pemerintah Kabupaten Boalemo melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja berupaya untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja melalui program pelatihan, dan sertifikasi tenaga kerja.

Grafik 20

Sertifikat Tenaga Kerja Kabupaten Boalemo, 2020-2024



Sumber: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boalemo, 2025

Data sertifikasi tenaga kerja Kabupaten Boalemo menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan selama periode lima tahun terakhir. Sertifikasi tenaga kerja merupakan indikator penting untuk menilai peningkatan kompetensi dan daya saing pekerja dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja yang terus berubah. Namun, Sertifikasi Kompetensi tersebut belum dilakukan oleh lembaga yang berkompeten seperti BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi), Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) dan lainnya, melainkan oleh Dinas setelah penyelenggaraan pelatihan. Namun pada tahun 2025, terdapat 17 peserta yang diikutkan sertifikasi kompetensi melalui LSK, dan terdapat 2 Peserta yang dinyatakan lulus.

Salah satu penyebab utama kurang optimalnya pelatihan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja di Kabupaten Boalemo adalah belum terbentuknya Balai Latihan Kerja (BLK), yang telah diupayakan pembentukannya pada tahun 2025 dengan harapan menjadi motor dalam penciptaan tenaga kerja yang berkompeten dan produktif sesuai kebutuhan Dunia Kerja dan Dunia Industri, maupun wirausaha mandiri.

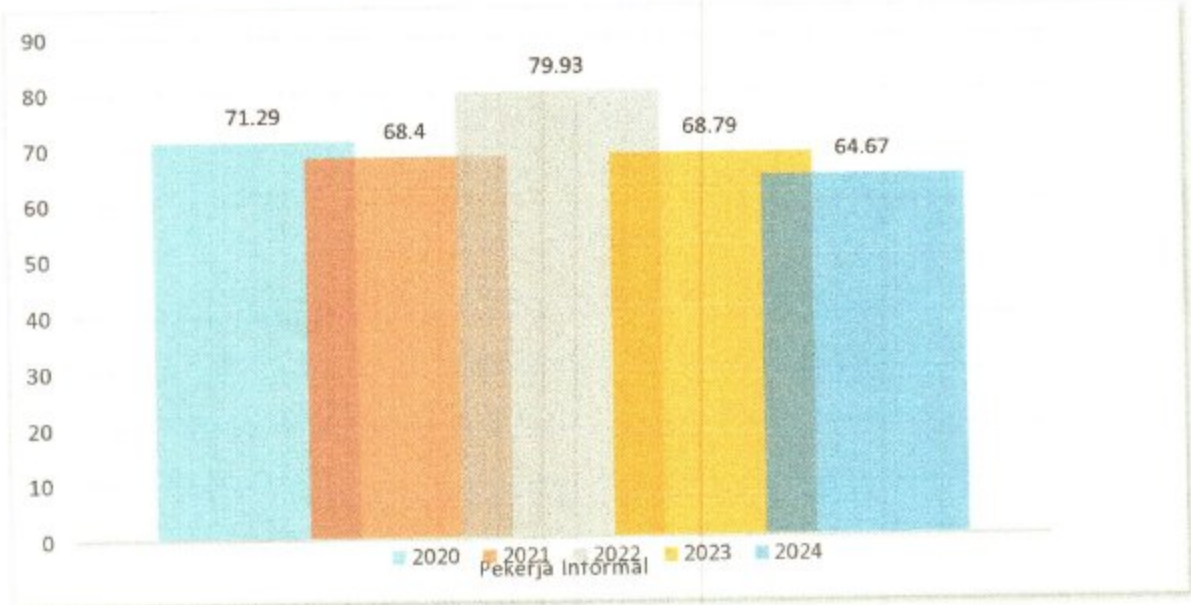
KABAG HUKUM	DINAS KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

5) **Pekerja Informal**

Grafik menunjukkan bahwa jumlah atau proporsi pekerja informal di Kabupaten Boalemo mengalami fluktuasi selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, angka pekerja informal berada pada level 71,29, kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 68,4 pada 2021. Penurunan ini dapat mencerminkan mulai menguatnya sektor formal setelah fase awal pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Grafik 21

Tren Pekerja Informal Kabupaten Boalemo, 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Boalemo, 2025

Pada 2022, angka pekerja informal naik cukup signifikan hingga mencapai 79,93, yang menjadi angka tertinggi selama periode pengamatan. Kenaikan ini mengindikasikan meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja pada sektor nonformal, kemungkinan dipengaruhi oleh kondisi pasar kerja yang belum sepenuhnya pulih atau dorongan ekonomi rumah tangga untuk mencari pekerjaan fleksibel.

Pada tahun 2023, angka pekerja informal kembali menurun menjadi 68,79, dan penurunan berlanjut pada 2024 hingga 64,67, level terendah dalam lima tahun terakhir. Tren penurunan ini dapat menunjukkan perbaikan struktur pekerjaan di Kabupaten Boalemo, meningkatnya penyerapan tenaga kerja formal, atau keberhasilan program pemerintah dalam mendorong UMKM naik kelas dan memperluas akses pekerjaan formal.

Secara keseluruhan, tren 2020–2024 menunjukkan pola yang berfluktuasi namun mengarah pada penurunan pekerja informal pada dua

KABUPATEN BOALEMO	DINAS KANTOR	ASB	SEKDA	WABUP

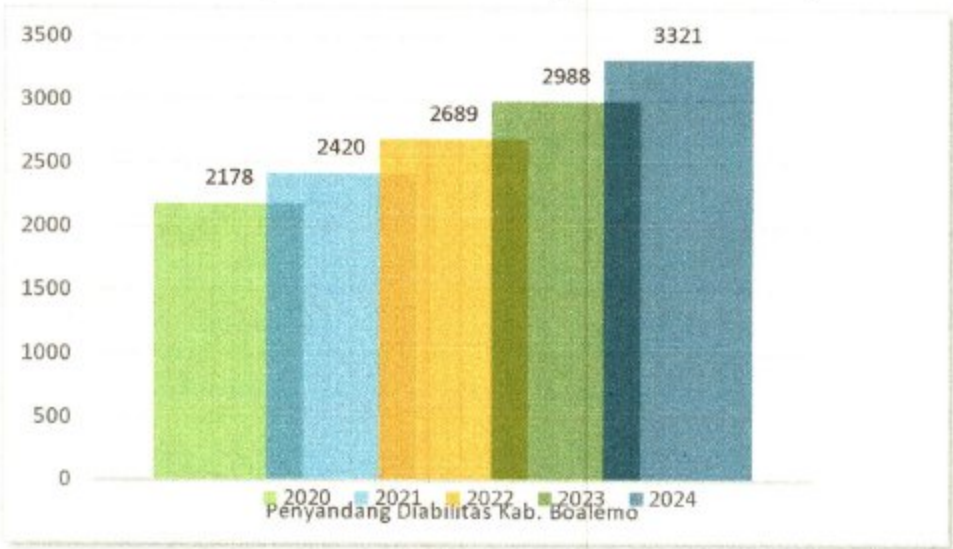
tahun terakhir, yang merupakan indikator positif bagi peningkatan kualitas ketenagakerjaan dan stabilitas ekonomi daerah.

6) **Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal**

Kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan hidup secara layak juga merupakan hak setiap penduduk, tak terkecuali penyandang disabilitas. Data Dinas Sosial dan PMB Kabupaten Boalemo menunjukkan jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Boalemo 2 (dua) tahun terkakhir adalah sebagai berikut:

Grafik 22

Jumlah Penyandang Disabilitas Kabupaten Boalemo, 2020-2024



Sumber : Dinas Sosial dan PMD. Kabupaten Boalemo, 2025

Jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Boalemo mengalami peningkatan yang konsisten selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020 jumlahnya tercatat sebanyak 2.178 orang, kemudian meningkat menjadi 2.420 orang pada 2021, dan kembali naik menjadi 2.689 orang pada 2022. Kenaikan jumlah penyandang disabilitas berlanjut pada 2023 hingga mencapai 2.988 orang, dan peningkatan tertinggi terjadi pada 2024 dengan total 3.321 orang. Tren ini mencerminkan adanya perbaikan dalam pendataan, semakin kuatnya pemutakhiran basis data sosial, serta meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan anggota keluarga dengan disabilitas.

Selain itu, peningkatan ini juga dapat mengindikasikan semakin luasnya cakupan layanan sosial serta adanya program verifikasi dan validasi (verval) yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan PMD Kabupaten BOalemo. Secara umum, tren lima tahun terakhir menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Boalemo terus bertambah dan membutuhkan perhatian pemerintah dalam penyediaan layanan,

KABAG HUKUM	DINAS SOSIAL KANTOR	ASST	SEKDA	WAGUP

aksesibilitas, program pemberdayaan, serta perlindungan sosial yang lebih komprehensif.

Dalam 5 tahun terakhir (2020-2024) partisipasi penyandang disabilitas dalam sektor formal di Kabupaten Boalemo relatif stabil, dengan persentase yang bergerak di kisaran 29,6% hingga 29,9% sebagaimana grafik berikut.

Grafik 23
Persentase Diabilitas bekerja di Sektor Formal Kabupaten Boalemo, 2020-2024



Sumber: Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Boalemo, 2025

Pada tahun 2020, persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal berada pada angka 29,8%, kemudian mengalami sedikit penurunan pada 2021 menjadi 29,66%. Namun, partisipasi kembali meningkat cukup signifikan pada 2022, mencapai nilai tertinggi sebesar 29,86%. Meskipun demikian, tahun 2023 kembali menunjukkan penurunan ke 29,62%, sebelum akhirnya meningkat lagi pada 2024 menjadi 29,7%. Secara keseluruhan, pola ini menandakan bahwa perubahan dari tahun ke tahun relatif kecil, sehingga partisipasi disabilitas pada sektor formal dapat dikategorikan stabil dan konsisten.

Fluktuasi kecil tersebut menggambarkan bahwa peluang kerja bagi penyandang disabilitas di sektor formal telah tersedia, namun peningkatannya masih terbatas. Untuk menjaga dan meningkatkan tren ini, diperlukan penguatan kebijakan inklusi ketenagakerjaan, penyesuaian lingkungan kerja, serta perluasan kesempatan kerja yang ramah disabilitas.

KABAG HUKUM	DINASRAK KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

f. Kondisi Kesetaraan Gender

1) Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen. Bila nilai IPG semakin tinggi maka semakin tinggi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Grafik 24

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Boalemo Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Boalemo, 2025

Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Boalemo menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, nilai IPG tercatat sebesar 81,15 persen dan meningkat menjadi 81,56 persen pada tahun 2021. Tren positif ini terus berlanjut dengan capaian 82,76 persen di tahun 2022, kemudian naik menjadi 83,20 persen pada tahun 2023, dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2024 dengan nilai sebesar 83,67 persen. Kenaikan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam pembangunan yang semakin responsif terhadap isu kesetaraan gender, baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Adapun perkembangan lengkap dari capaian IPG tersebut dapat dilihat pada grafik berikut.

KABAG. HUKUM	DINAS. HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP

2) Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Perkembangan capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Boalemo dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan perkembangan yang variatif namun cenderung positif. Pada tahun 2020, IDG berada pada angka 69,15 persen dan mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2021 menjadi 70,38 persen. Namun demikian, pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 67,80 persen. Selanjutnya, pada tahun 2023, capaian IDG kembali mengalami kenaikan menjadi 69,46 persen, dan akhirnya menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2024 dengan capaian tertinggi sebesar 74,76 persen. Tren ini menggambarkan adanya upaya berkelanjutan dari Pemerintah Kabupaten Boalemo dalam meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, maupun kelembagaan.

Grafik 25

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Boalemo Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Boalemo, 2025

3) Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menggambarkan kerugian/kegagalan (loss) dari pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender yang diukur dari aspek kesehatan, pemberdayaan, serta akses dalam pasar tenaga kerja. Pengukuran IKG

KABAG HUTAN	ONASBADA KANTON	ASE	SEKDA	WABUP

dilakukan untuk membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengevaluasi capaian pembangunan menurut gender dan memformulasikan kebijakan yang lebih tepat. Hasil pengukuran yang dilakukan oleh BPS terhadap Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Boalemo terjadi penurunan sebesar 0,137 selang tahun 2020-2024. Perkembangan nilai Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Boalemo selama kurun waktu Lima tahun terakhir menunjukkan arah perbaikan, meskipun sempat mengalami kenaikan pada awal periode.

Pada tahun 2020, nilai IKG tercatat sebesar 0,456 dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 0,480, yang mengindikasikan adanya peningkatan ketimpangan gender pada periode tersebut. Namun demikian, pada tahun 2022, nilai tersebut menurun cukup signifikan menjadi 0,384. Meskipun pada tahun 2023 terjadi sedikit kenaikan menjadi 0,430, tren positif kembali terlihat di tahun 2024 dengan capaian nilai IKG sebesar 0,319. Penurunan nilai IKG dari tahun ke tahun merupakan indikator positif yang berarti semakin kecilnya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan, termasuk kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi.

Grafik 26

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Boalemo Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Boalemo, 2025

Penurunan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) disebabkan oleh semakin banyaknya perempuan yang terlibat dalam dunia kerja, menurunnya angka kematian ibu, serta meningkatnya akses perempuan terhadap pelayanan kesehatan reproduksi. Selain itu, peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan dan bertambahnya keterwakilan

KABUPATEN BOALEMO	DINAS KEMENTERIAN	ASB	SEKDA	WABUP

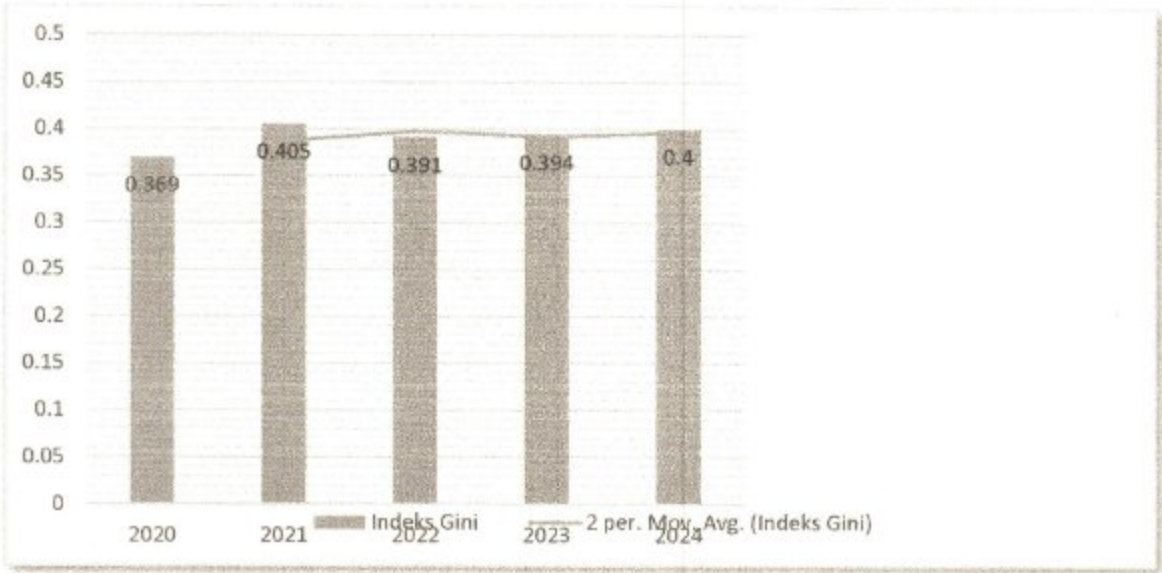
perempuan di lembaga legislatif turut berkontribusi terhadap membaiknya kesetaraan gender secara keseluruhan.

g. Indeks Gini

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh, Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Grafik 27

Indeks Gini Kabupaten Boalemo Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Boalemo, 2025

Indeks gini di kabupaten Boalemo selang tahun 2020-2024 mengalami fluktuatif, Indeks gini Kabupaten Boalemo pada tahun 2020 berada pada angka 0,369 naik sebanyak 0,031 pada tahun 2024 menjadi 0,400, selama periode tersebut tercatat indeks gini terendah terjadi pada tahun 2020 dengan angka 0,369, sementara tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan angka 0,405. Pencapaian indeks gini pada tahun 2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Boalemo masih berada pada kategori ketimpangan sedang.

h. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan indikator penting untuk melihat tingkat kesejahteraan ekonomi

KABAG HUKUM	DINASISDAK KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

masyarakat. Data PDRB Kabupaten Boalemo baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK) menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2020–2024.

Tabel 14.

PDRB Perkapita (ADHB dan ADHK) Kabupaten Boalemo Tahun 2020-2024

Tahun	PDRB Perkapita ADHB (dalam Ribu Rupiah)	PDRB Perkapita ADHK (dalam Ribu Rupiah)
2020	37.755,55	24.048,63
2021	38.885,98	24.204,15
2022	40.940,02	24.623,22
2023*	43.516,71	25.381,75
2024**	45.563,74	25.948,68

*2023 Angka Sementara

**2024 Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kabupaten Boalemo, 2025

PDRB per kapita Kabupaten Boalemo menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2020–2024, baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun harga konstan (ADHK). PDRB per kapita ADHB meningkat dari Rp37.755,55 ribu pada tahun 2020 menjadi Rp45.563,74 ribu pada tahun 2024, yang mencerminkan pertumbuhan nilai ekonomi dan pendapatan nominal per penduduk.

Sementara itu, PDRB per kapita ADHK juga mengalami kenaikan dari Rp24.048,63 ribu pada tahun 2020 menjadi Rp25.948,68 ribu pada tahun 2024, yang mengindikasikan adanya pertumbuhan ekonomi riil setelah memperhitungkan pengaruh inflasi. Secara keseluruhan, peningkatan kedua indikator ini menunjukkan perbaikan kinerja perekonomian daerah dan meningkatnya daya beli masyarakat Kabupaten Boalemo, meskipun data tahun 2023 dan 2024 masih bersifat sementara dan sangat sementara.

3. Pembangunan Keluarga

a. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Indeks Keluarga Sehat yang selanjutnya disingkat IKS adalah salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat, untuk mengetahui nilai Indeks Keluarga Sehat

KABAG HUKUM	DINASRAGAS KANTOR	ASR	SEKDA	WABUP
				

menggunakan 12 (dua belas) indikator. Kategori Indeks Keluarga Sehat terbagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu, (1) kategori keluarga sehat bila nilai IKS lebih dari 0,800, (2) kategori pra sehat bila nilai IKS berada di antara 0,500-0,800, (3) kategori keluarga tidak sehat bila nilai IKS di bawah dari 0,500.

Capaian Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Boalemo pada tahun 2024 berada pada angka 0,24, hal ini menunjukkan Kabupaten Boalemo masih berada pada kategori tidak sehat. Masih rendahnya capaian Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Boalemo disebabkan belum maksimalnya inputan data puskesmas sebagai pengelola data serta belum maksimalnya semua sasaran keluarga di Kabupaten Boalemo yang akan menjadi sampel perhitungan.

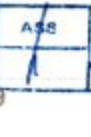
Adapun capaian dari 12 Indikator utama sebagai perhitungan Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Boalemo pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 15.

Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Boalemo, 2024

No.	IKU Keluarga Sehat	Capaian
1	Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB)	77,05%
2	Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan	97,93%
3	Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap	95,66%
4	Bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif	46,46%
5	Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan	87,56%
6	Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar	46,7 %
7	Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur	25,23%
8	Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan	21,66%
9	Anggota keluarga tidak ada yang merokok	42,26%
10	Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	73,56%
11	Keluarga mempunyai akses sarana air bersih	93,37%
12	Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat	88,67%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo, 2025

KABAG HUKUM	DINASIDAN KANTOR	ASS	SEKDA	WAGUP
				

Tabel di atas menggambarkan capaian berbagai indikator keluarga sehat di Kabupaten Boalemo tahun 2024, dengan capaian yang sangat baik, terutama terkait akses layanan kesehatan dasar. Persalinan di fasilitas kesehatan mencapai 97,93%, dan imunisasi dasar lengkap pada bayi mencapai 95,66%, menunjukkan tingginya jangkauan layanan kesehatan ibu dan anak. Selain itu, akses keluarga terhadap sarana air bersih (93,37%) dan penggunaan jamban sehat (88,67%) juga tergolong tinggi, mencerminkan kondisi lingkungan yang cukup mendukung kesehatan keluarga.

Indikator keluarga yang mengikuti program KB (77,05%) serta kepesertaan JKN (73,56%) menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga memiliki akses terhadap layanan pengendalian kelahiran dan jaminan kesehatan. Pemantauan pertumbuhan balita juga tinggi, yaitu 87,56%, menandakan kesadaran dan akses yang baik terhadap layanan kesehatan anak.

Namun, beberapa indikator masih memerlukan perhatian serius. Penderita tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pengobatan sesuai standar masih berada pada angka 46,7%, demikian pula ASI eksklusif yang hanya mencapai 46,46%, menunjukkan masih rendahnya praktik pemberian ASI. Indikator perilaku kesehatan juga memperlihatkan tantangan, seperti rendahnya persentase keluarga tanpa perokok (42,26%) serta rendahnya kepatuhan penderita hipertensi dalam pengobatan (25,23%) dan penanganan gangguan jiwa (21,66%).

b. Air dan Sanitasi

1) Cakupan Air Minum

Sumber air minum yang paling banyak dikonsumsi rumah tangga di Kabupaten Boalemo berasal dari Perpipaan (PDAM,BPSPAM) yaitu 35,5% rumah tangga. Persentase rumah tangga menurut sumber air minum di Kabupaten Boalemo tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 16.

Jumlah Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum di Kabupaten Boalemo, 2024

No	Sumber Air Minum	Persentase
1	Sumur Gali Terlindung	32,6
2	Sumur Gali Dengan Pompa	6,22

KABAG HUKUM	KEPUSAKA KANTOR	ASB	SEKDA	WABUP
				

3	Sumur Bor Dengan Pompa	13,86
4	Terminal Air	0,04
5	Mata Air Terlindung	0,96
6	Penampungan Air Hujan	0,11
7	Perpipaan (PDAM,BPSPAM)	35,5

Sumber : Dinas PUPRPKP Kabupaten Boalemo, 2025

Cakupan Sarana Air Minum bagi masyarakat dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 cakupan Air Minum di Kabupaten Boalemo mencapai 88,63 persen dengan sebaran cakupannya di setiap kecamatan yang relatif berbeda. Cakupan air minum tertinggi berada di Kecamatan Mananggu yaitu 94,88 persen sedangkan cakupan air minum terendah berada di Kecamatan Paguyaman Pantai sebesar 72,52 persen.

Tabel 17.

Cakupan Sarana Air Minum, 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk (KK)	Bukan Jaringan Perpipaan		Jaringan Perpipaan		Jumlah Yang Sudah Terlayani		Belum Terlayani		Persentase (%)	
				Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK
1	Mananggu	13.548	4.520	3.637	1.176	7.252	2.345	12.855	3.521	693	999	94,88	77,90
2	Botumoito	16.041	5.354	5.876	1.900	8.712	2.817	14.635	4.717	1.406	637	91,23	88,10
3	Tilamuta	31.565	10.201	4.892	1.582	24.864	8.040	29.662	9.622	1.903	579	93,97	94,32
4	Dulupi	17.775	5.833	6.575	2.126	8.433	2.727	15.908	4.853	1.867	980	89,50	83,20

KABAG HUKUM	DINASRADAAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

5	Paguyama n	35.80 1	11.52 3	19.66 8	6.36 0	11. 980	3. 87 4	32. 942	10. 23 4	2.8 59	1.2 89	92,01	88,8 1
6	Wonosari	29.23 6	9.520	17.31 2	5.59 8	9.3 27	3. 01 6	24. 028	8.6 14	5.2 08	90 6	82,19	90,4 8
7	Paguyama n Pantai	8.885	2.797	1.531	495	5.4 15	1. 75 1	6.4 43	2.2 46	2.4 42	55 1	72,52	80,3 0
	Jumlah	152.8 51	49.74 8	59. 490	19. 237	75. 983	24 . 57 0	136 . 473	43. 80 7	16. 37 8	5. 94 1	89, 28	88, 06

Sumber : Dinas PUPRPKP Kabupaten Boalemo, 2025

2) Cakupan Sanitasi

Cakupan sanitasi bagi masyarakat merupakan salah satu bagian dari standar pelayanan minimal yang harus diprioritaskan. Pada tahun 2024 cakupan sanitasi di Kabupaten Boalemo mencapai 84,86 persen di hitung dari jumlah jiwa dengan sebaran cakupannya di setiap kecamatan yang relative berbeda. Cakupan sanitasi tertinggi berada di Kecamatan Tilamuta yaitu 93,95 persen sedangkan cakupan sanitasi terendah berada di Kecamatan Dulupi sebesar 79,07 persen.

Tabel 18.

Cakupan Akses Sanitasi Kabupaten Boalemo, 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk (KK)	Jumlah Kk Yang Sudah Akses Sanitasi		Jumlah Kk Yang Belum Akses Sanitasi		Persentase (%)	
				Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK
1	Mananggu	13.548	4.520	11.288	3.650	2.260	870	83,32	80,75
2	Tilamuta	31.565	10.201	29.654	9.560	1.911	641	93,95	93,72
3	Dulupi	17.775	5.833	14.055	4.545	3.720	1.288	79,07	77,92

KABAG HUKUM	DINASDAWA KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

4	Botumoito	16.041	5.354	13.950	4511	2.091	843	86,96	84,25
5	Paguyaman	35.801	11.523	28.618	9.254	7.183	2.269	79,94	80,31
6	Wonosari	29.236	9.520	24.307	7.860	4.929	1.660	83,14	82,56
7	Paguyaman pantai	8.885	2.797	7.880	2548	1.005	249	88,69	91,10
	Boalemo	152.851	49.748	129.752	41.928	23.099	7.820	84,89	84,28

Sumber : Dinas Perkimhubtan Kabupaten Boalemo, 2025

4. Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

a. Sebaran Penduduk

Analisis persebaran dan mobilitas penduduk Kabupaten Boalemo selama lima tahun terakhir (2020–2024) menunjukkan adanya dinamika peningkatan jumlah penduduk di seluruh kecamatan, meskipun dengan laju pertumbuhan yang bervariasi. Perkembangan ini memberikan gambaran penting terkait arah kebijakan penataan ruang, kebutuhan pelayanan publik, dan strategi pemerataan pembangunan antarwilayah.

Tabel 19.

Sebaran Pendudukan Kabupaten Boalemo, 2020-2024

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Mananggu	12.854	12.945	13.064	13.123	13.548
2.	Tilamuta	30.230	30.513	30.863	30.977	31.565
3.	Dulupi	17.274	17.422	17.607	17.444	17.775
4.	Botumoito	15.339	15.404	15.502	15.737	16.041
5.	Paguyaman	33.912	34.216	34.595	34.861	35.801
6.	Wonosari	27.910	28.124	28.398	28.935	29.236
7.	Paguyaman Pantai	8.349	8.414	8.497	8.693	8.885
Boalemo		145.868	147.038	148.526	149.770	152.851

Sumber: BPS Kabupaten Boalemo, 2025

Secara umum, persebaran penduduk Kabupaten Boalemo cenderung terkonsentrasi pada Kecamatan Paguyaman, Tilamuta, dan Wonosari, tiga

KAB. BOALEMO	DINAS PERKIMHUBTAN	ASB	SEKDA	WABUP
				

wilayah dengan jumlah penduduk terbesar. Ketiganya secara konsisten mendominasi komposisi penduduk dari tahun ke tahun. Persebaran penduduk Kabupaten Boalemo memperlihatkan pola konsentrasi pada kecamatan-kecamatan tertentu yang menjadi pusat aktivitas, sementara kecamatan pesisir dan pinggiran tumbuh lebih lambat.

Sementara itu, dari aspek mobilitas penduduk, total penduduk Kabupaten Boalemo meningkat dari 145.868 jiwa (2020) menjadi 152.851 jiwa (2024). Kenaikan ini menandakan adanya:

- Pertumbuhan alami (kelahiran – kematian)
- Mobilitas penduduk, baik masuk maupun keluar antar kecamatan dan antar daerah, dan
- Pengembangan wilayah tertentu yang meningkatkan attractiveness bagi penduduk

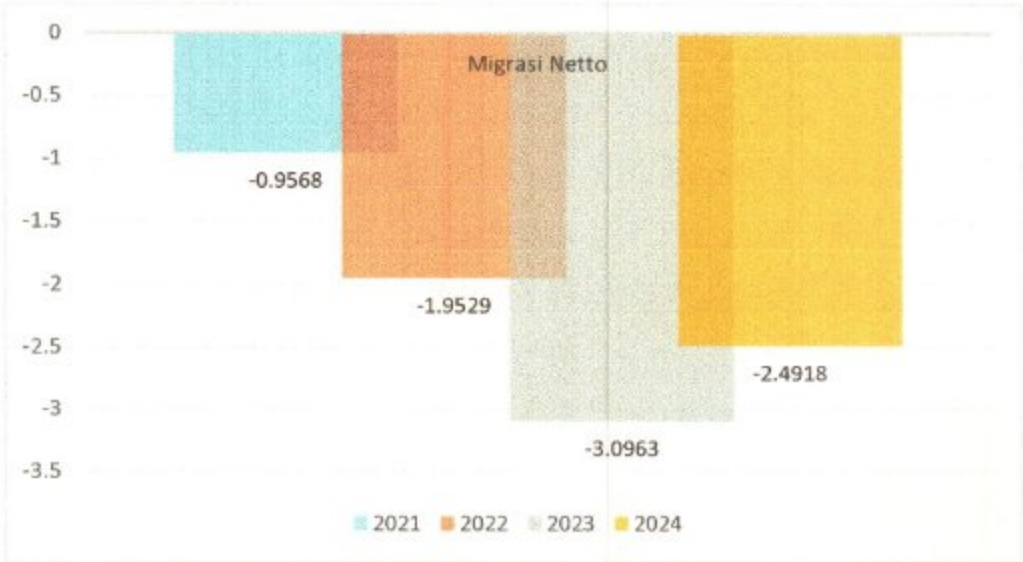
Mobilitas penduduk cenderung bergerak ke wilayah yang lebih berkembang (Tilamuta, Paguyaman, Wonosari). Oleh karena itu, strategi penataan persebaran penduduk perlu diarahkan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah, meningkatkan daya tarik dan fasilitas kecamatan dengan pertumbuhan rendah, mengoptimalkan pusat pertumbuhan baru dan mengendalikan perkembangan permukiman di wilayah yang mengalami konsentrasi penduduk.

b. Migrasi Neto Penduduk

Kabupaten Boalemo mengalami migrasi netto negatif selama empat tahun berturut-turut, yang berarti jumlah penduduk yang keluar dari daerah selalu lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk yang masuk.

Grafik 28

Rate Nett Migration (Migrasi Netto) Kabupaten Boalemo, 2021-204



Sumber: DPPKBP3A Kabupaten Boalemo, 2025

KAB. BOALEMO	DISKOR	ASS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Tren ini menunjukkan bahwa tingkat kehilangan penduduk melalui migrasi semakin besar pada tahun 2022 dan mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan nilai lebih dari -3,0, sebelum sedikit membaik pada tahun 2024. Penurunan terbesar terjadi pada 2023, yang mengindikasikan adanya peningkatan mobilitas penduduk keluar daerah, kemungkinan terkait faktor ekonomi, kesempatan kerja di luar daerah, ataupun daya tarik wilayah lain yang lebih tinggi. Perbaikan pada tahun 2024 menunjukkan adanya pengurangan arus keluar, meskipun Boalemo masih tetap dalam kondisi defisit migrasi.

Secara umum, pola ini menjadi sinyal penting bagi Pemerintah Daerah untuk memperkuat peluang kerja, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi lokal agar migrasi keluar dapat ditekan pada tahun-tahun berikutnya.

5. Administrasi Kependudukan

Perkembangan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Boalemo selama periode dalam dua tahun terakhir (2023-2024) menunjukkan peningkatan kinerja yang konsisten pada hampir seluruh indikator. Hal ini menggambarkan semakin baiknya cakupan dokumen kependudukan, pemanfaatan data, serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen identitas resmi. Rasio penduduk yang telah memiliki KTP mengalami peningkatan dari 98,62% pada 2023 menjadi 99,56% pada 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk wajib KTP telah terlayani. Selain capaian persentase, jumlah pemilik KTP juga meningkat dari 103.971 menjadi 109.752 dalam 2 tahun terakhir.

Tabel 20.

**Indikator Bidang urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Boalemo, 2023-2024**

No.	Indikator Kinerja	2023	2024
1.	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk (%)	98,62%	98,86%
2.	Rasio keluarga memiliki Kartu Keluarga (%)	95,84%	97,06%
3.	Rasio bayi memiliki Akta Kelahiran (%)	97,59%	98,59%

KAB. BOALEMO	DINAS DAERAH	ASST. DAERAH	SEK. DAERAH	WABUP

4.	Rasio Pasangan memiliki Akta Nikah (%)	57,68%	60,05%
5.	Rasio Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) (%)	54,32%	55,41%
6.	Persentase pemanfaatan data kependudukan (%)	5 SOPD	7 SOPD

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, 2025

Untuk indikator Capaian kepemilikan KK terus menunjukkan tren positif, dari 95,84% pada 2023 menjadi 99,70% pada 2024. Peningkatan persentase ini mencerminkan layanan penerbitan KK yang semakin baik, dengan jumlah keluarga pemilik KK meningkat dari 45.431 menjadi 48.918. Berdasarkan Rasio Bayi Memiliki Akta Kelahiran, pada tahun 2023, rasio bayi berakta kelahiran mencapai 97,59%, dan meningkat hingga mendekati universal coverage pada tahun 2024 dengan 99,93%. Hal ini menandakan efektivitas kebijakan percepatan kepemilikan akta kelahiran.

Rasio pasangan yang memiliki akta nikah mengalami pertumbuhan signifikan, dari 57,68% pada 2023 menjadi 67,33% pada 2024. Kenaikan lebih dari 9,6 poin persentase ini menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dan efektivitas layanan pencatatan pernikahan. Dari aspek, kepemilikan KIA mengalami tren meningkat, walaupun persentasenya masih relatif rendah dibanding indikator lain. Persentase kepemilikan naik dari 54,32% (2023) menjadi 57,41% (2024). Jumlah pemilik KIA meningkat dari 20.272 menjadi 23.393 anak. Peningkatan ini menunjukkan bahwa program KIA mulai mendapatkan perhatian yang lebih baik dari masyarakat. Pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah (SOPD) meningkat pesat dari hanya 5 SOPD pada 2023 menjadi 14 SOPD pada 2024. Ini menggambarkan perluasan penggunaan data kependudukan sebagai rujukan utama perencanaan dan pelayanan publik.

Secara keseluruhan, indikator urusan kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Boalemo menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam empat tahun terakhir, baik dari sisi cakupan dokumen kependudukan maupun pemanfaatan data. Capaian tertinggi adalah akta kelahiran yang hampir mencapai 100%, sedangkan tantangan terbesar masih pada peningkatan cakupan KIA.

KABAG KEMUN /	DINASBACIK KANTOR /	ASS /	SEKDA /	WABUP /
---------------------	---------------------------	----------	------------	------------

Matriks Analisis Situasi Kependudukan

No	Indikator	Pressure	State	Respond	Impact
1	TFR (Total Fertility Rate)	- Kesadaran ber-KB masih rendah. - Perkawinan usia muda dan kelahiran di luar nikah masih tinggi - Akses kontrasepsi jangka panjang belum merata.	TFR Boalemo 2024 = 2,19, lebih tinggi dari provinsi & nasional. Mengindikasikan kebutuhan penguatan pengendalian fertilitas.	- Ekspansi layanan KB hingga desa terpencil. - Edukasi KB berbasis komunitas dan tokoh lokal. - Insentif penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP).	- TFR terjaga stabil dan menurun menjadi 2,05 dalam 5 tahun - Risiko pertumbuhan penduduk berlebih dapat dikendalikan.
2	ASFR usia 15-19 tahun	- Perkawinan usia anak masih tinggi - Keterbatasan edukasi kesehatan reproduksi remaja. - Norma sosial belum sepenuhnya mendukung penundaan usia perkawinan.	ASFR remaja 2024 = 50 per 1.000 remaja. Menunjukkan risiko kehamilan remaja dan gangguan pendidikan.	- Penguatan PKBR, PIK-R, dan Genre. - Kolaborasi sekolah-puskesmas-tokoh agama. - Pemeriksaan kesehatan remaja di sekolah dan sosialisasi kesehatan seksual.	- ASFR menurun menjadi ±35 dalam 5 tahun. - Penurunan risiko kehamilan remaja dan peningkatan kualitas SDM muda.
3	Proporsi Kebutuhan	- Pengetahuan manfaat KB	- Cakupan Kebutuhan	- Penguatan KIE dan	- Proporsi KB terpenuhi

KB Terpenuhi	masih terbatas. - Layanan KB di desa terpencil belum optimal.	KB Terpenuhi 2024 = 88,40%. - Masih ada kelompok unmet need.	konseling KB. - Perluasan layanan KB melalui puskesmas & posyandu.	meningkat menjadi 91,8%. - Risiko kehamilan tidak diinginkan menurun.
-----------------	--	---	---	--

Matriks analisis situasi kependudukan Kabupaten Bone Bolango untuk seluruh Indikator Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dengan pendekatan PSRI (*pressure, state, respond dan impact*) sebagai berikut:

a. **Pengelolaan Kuantitas Penduduk**

Tabel 21.

Matriks Analisis PSRI Pengelolaan Kuantitas Penduduk Kabupaten Boalemo

b. **Peningkatan Kualitas Penduduk**

Tabel 22.

Matriks Analisis PSRI Peningkatan Kualitas Penduduk Kabupaten Boalemo

No	Indikator	Pressure	State	Respond	Impact
1	Rata-rata Lama Sekolah	- Keterbatasan ekonomi keluarga. - Akses pendidikan di desa terpencil tidak merata.	RLS 2024 = 7,31 tahun, di bawah provinsi & nasional.	- Beasiswa keluarga miskin - Perluasan akses SMP/SMA - Penguatan literasi & pendampingan belajar.	- RLS meningkat menjadi 7,65. - Peningkatan kualitas SDM berkelanjutan.
2	APK Pendidikan Tinggi	- Biaya kuliah dan transportasi tinggi. - Minim informasi beasiswa & peluang pendidikan tinggi.	APK Perguruan Tinggi masih rendah; banyak lulusan SMA langsung bekerja.	- Beasiswa daerah dan kemitraan PT - Sosialisasi pentingnya pendidikan tinggi.	- APK meningkat. - SDM lebih kompetitif di pasar kerja.

KADISTRIK	DISASDAK	ASS	SEKDA	WABUP
				

3	Penduduk Bersertifikat Keahlian	- Minimnya pelatihan berbasis kompetensi (BLK/BLD). - Kurangnya akses pembiayaan pelatihan.	Hanya 2 tenaga kerja tersertifikasi pada 2024.	- Optimalisasi BLD/BLK untuk pelatihan & sertifikasi - Kolaborasi dunia industri.	- Tenaga kerja tersertifikasi meningkat menjadi 30 - Produktivitas & daya saing tenaga kerja naik.
4	Prevalensi Stunting	- Rendahnya kualitas gizi pada 1.000 HPK. - Sanitasi dan air bersih belum memadai. - Literasi gizi keluarga masih rendah.	Stunting 2024 = 8% (terendah di Gorontalo).	- Penguatan intervensi spesifik-sensitif gizi - Perbaikan sanitasi & air bersih - Penguatan edukasi gizi keluarga.	- Stunting menurun di bawah 6% - Peningkatan kualitas generasi masa depan.
5	Angka Kematian Bayi (AKB)	- Keterbatasan akses layanan kesehatan maternal neonatal. - Rendahnya cakupan ANC dan PNC bermutu. - Masalah gizi dan infeksi pada bayi.	AKB Boalemo masih tinggi yaitu 2024: 27.32 Kasus per 1.000 kelahiran hidup, mengalami peningkatan (negatif) dari tahun sebelumnya	- Penguatan layanan kesehatan neonatal. - Deteksi dini risiko kehamilan. - Intervensi gizi ibu & bayi. - Penguatan jejaring rujukan.	- Penurunan AKB dari 27.32 menjadi 22 kasus dalam 5 tahun. - Meningkatnya kelangsungan hidup bayi.
6	Angka Kematian Ibu (AKI)	- Ketidaksiapan fasilitas rujukan obstetri - Deteksi dini risiko kehamilan tidak optimal. - Akses transportasi kesehatan	AKI Boalemo 2024: 78,99 per 100.000 Kelahiran. Mengalami penurunan signifikan namun belum memenuhi	- Penguatan pelayanan kebidanan & kegawatdaruratan maternal. - Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan - Sistem rujukan cepat &	- Penurunan AKI & kesehatan ibu membaik - Keselamatan ibu pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas meningkat.

		darurat terbatas.	sasaran 70 AKI	transportasi maternal.	
7	Tingkat Kemiskinan	- Ketergantungan pada sektor informal & pertanian subsisten - Pendapatan rumah tangga tidak stabil - Akses layanan dasar belum merata.	Kemiskinan Boalemo 2024: 17,83%, tertinggi kedua di Gorontalo	- Penguatan program perlindungan sosial - Pemberdayaan ekonomi keluarga miskin - Akses UMKM, pelatihan, dan bantuan modal.	- Kemiskinan menurun menjadi 15-16% - Meningkatnya kemandirian ekonomi rumah tangga.
8	Partisipasi Kerja Wanita	- Norma sosial membatasi peran perempuan - Akses modal dan pelatihan masih terbatas.	TPKW 2024 = 54,18%, menurun 3 tahun terakhir.	- Pelatihan UMKM dan vokasi perempuan - Bantuan untuk Perempuan Kepala Keluarga.	- Pendapatan rumah tangga meningkat - Kemandirian ekonomi perempuan menguat.
9	Pekerja Informal	- Struktur ekonomi didominasi sektor informal - Keterbatasan akses permodalan dan legalitas usaha.	Proporsi pekerja informal adalah 64.67% pada tahun 2024	- Program formalisasi usaha & sertifikasi usaha mikro - Pelatihan kewirausahaan.	- Penurunan Sektor informal hingga 49.67% - Peningkatan produktivitas tenaga kerja - Perlindungan sosial pekerja meningkat.
10	Pekerja Disabilitas di Sektor Formal	- Minimnya fasilitas kerja inklusif - Rendahnya pendataan &	Terdapat 28.79% Disabilitas yang bekerja	- Pendataan terintegrasi tenaga kerja disabilitas.	- Kemandirian ekonomi disabilitas meningkat

KABAG HUKUM	DINASIBIDAN KANTOR	ASIS	SEKDA	WABUP
				

		pendampingan disabilitas.	di sektor formal	- Pelatihan inklusif & fasilitasi bantuan usaha.	- Lingkungan kerja lebih inklusif.
11	Gini Ratio	- Kesenjangan akses ekonomi dan produktivitas - Konsentrasi pendapatan pada kelompok tertentu.	Gini Ratio 2024 = 0,400 (ketimpangan sedang).	- Pelatihan ekonomi & penguatan UMKM - Perluasan kesempatan kerja daerah.	- Gini Ratio turun menjadi 0,38 - Pemerataan pendapatan membaik.
12	PDRB Per Kapita	- Ketergantungan tinggi pada sektor pertanian tradisional - Nilai tambah produk masih rendah.	PDRB/kapita 2024 = 43.522,98 juta.	- Diversifikasi ekonomi - Peningkatan investasi daerah & hilirisasi.	PDRB/kapita meningkat menjadi 50.774,09 juta.
13	Tingkat Pengangguran Terbuka	- Lapangan kerja formal terbatas - Keterampilan tenaga kerja tidak sesuai kebutuhan industri.	TPT Boalemo masih tinggi di tahun 2024: 3,06%	- Vokasi & penguatan UMKM - Inkubasi wirausaha muda.	TPT menurun menjadi 2,0% dalam lima tahun

KABAG HUKUM	DINASIAKUM KANTOR	ASE	SEKDA	WABUP
				

c. Pembangunan Keluarga

Tabel 23

Matriks Analisis PSRI Pembangunan keluarga di Kabupaten Boalemo

No	Indikator	Pressure	State	Respond	Impact
1	Indeks Pembangunan keluarga (i-bangga)	- Partisipasi rendah dalam BKB, BKR, BKL - Minim literasi kesehatan reproduksi, parenting, dan ekonomi keluarga - Konseling pranikah belum optimal - Banyak keluarga prasejahtera.	Nilai i-bangga kabupaten Boalemo tahun 2024 adalah 59.75	- Optimalisasi BKB-BKR-BKL - Penguatan Kampung KB - Peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial - Peningkatan keterampilan ekonomi keluarga.	- i-Bangga meningkat ke 61,20 - Keluarga lebih harmonis, mandiri, dan sejahtera.
2	Indeks Perlindungan Anak	- Tingginya kasus kekerasan terhadap anak - Minimnya sistem deteksi dini & layanan rehabilitasi. - Kemiskinan dan lingkungan keluarga berisiko.	Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Boalemo masih rendah	- Penguatan PATBM & UPTD PPA. - Edukasi anti-kekerasan - Sistem pelaporan berbasis desa	Penurunan kekerasan anak & peningkatan kesejahteraan anak.
3	Rumah tangga dengan akses air bersih	- Keterbatasan infrastruktur air bersih di wilayah terpencil - Ketergantungan pada sumber air permukaan yang tidak aman	Akses Rumah tangga terhadap Air bersih mencapai 93.37%	- Pengembangan SPAM desa - Penyediaan sarana air bersih berbasis masyarakat - Edukasi higienitas air dan	- Peningkatan Akses Rumah Tangga terhadap Air bersih menjadi 97% di tahun 2030

KABAG HUKUM	DINAS/DAIRAH KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

		- Kualitas air minum belum terjamin. -		- penyaringan rumah tangga. -	- Penurunan risiko penyakit berbasis air. -
4	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	- Rendahnya kepemilikan jamban sehat - Perilaku BABS masih terjadi di beberapa desa - Sarana sanitasi belum memenuhi standar kesehatan. -	Akses sanitasi aman belum merata, terdapat rumah tangga dengan sanitasi tidak layak.	- Pembangunan jamban sehat - Program STBM & edukasi PHBS - Bantuan stimulan sanitasi. -	- Akses sanitasi aman naik dalam 5 tahun menjadi 100% - Penurunan kasus penyakit berbasis lingkungan (diare, stunting). - Meningkatnya kualitas hidup keluarga.
5	Indeks lansia berdaya	- Minimnya program pemberdayaan lansia - Terbatasnya akses layanan kesehatan geriatri - Ketergantungan ekonomi pada keluarga. -	Peningkatan jumlah lansia namun belum diimbangi dengan pelayanan dan pemberdayaan memadai.	- Penguatan Posyandu Lansia - Program peningkatan kemandirian ekonomi lansia - Layanan kesehatan lansia & deteksi dini penyakit degeneratif. -	Lansia lebih mandiri, sehat, dan berdaya sosial-ekonomi.
6	Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	- Minim edukasi pengasuhan remaja - Komunikasi orang tua-remaja belum efektif - Pengaruh sosial & digital tanpa pendampingan.	Pengasuhan remaja belum optimal, berdampak pada perilaku berisiko dan kesehatan mental.	- Edukasi parenting remaja - Penguatan PIK-R & konseling keluarga - Kampanye keluarga sehat dan komunikasi efektif.	- Pengasuhan remaja lebih adaptif - Penurunan perilaku berisiko & peningkatan kesehatan mental remaja.

7	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	- Pengurangan kepesertaan APBN sehingga pembiayaan dibebankan ke daerah - Keterbatasan anggaran pemerintah daerah - Literasi masyarakat terkait manfaat JKN belum optimal.	Cakupan Kepesertaan JKN Kabupaten Boalemo tahun 2024 adalah 97.16%	- Penambahan anggaran daerah untuk kepesertaan JKN - Pendorongan masyarakat untuk ikut JKN mandiri - Verifikasi dan validasi data kepesertaan.	- Peningkatan Cakupan Kepesertaan JKN mencapai 98,31% pada tahun 2030 - Perlindungan kesehatan masyarakat semakin kuat.
---	--	--	--	--	--

d. PENATAAN PERSEBARAN & PENGARAHAN MOBILITAS

Tabel 24

Matriks Analisis PSRI Pesebaran dan Pengarahan Mobilitas
Penduduk Kabupaten Boalemo

N o	Indikator	Pressure	State	Respond	Impact
1	Kampung Keluarga Berkualita s Mandiri	- Kapasitas kelembagaa n rendah - Kader kampung KB belum optimal - Partisipasi masyarakat rendah - Data sosial ekonomi desa belum dimanfaatka n maksimal.	Persentas e Kampung KB Mandiri 2024: belum mencapai target.	- Penguatan kelembagaan & kapasitas kader - Integrasi lintas sektor (pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial) - Optimalisasi peran pemerintah desa.	Kampung KB Mandiri meningkat menjadi 46,34%.

KABAG. HUKUM	DINAS/BAKOR KANTOR	ASB	SEDA	WABUP
				

2	Rate Nett Migration	- Ketimpangan pembangunan antarwilayah - Keterbatasan lapangan kerja formal - Mobilitas sosial karena perkawinan/keluarga.	Migrasi neto = - 2,49 (negatif).	- Pengembangan UMKM & ekonomi kreatif - Program pemberdayaan penduduk produktif berbasis desa.	- Migrasi neto mendekati nol atau positif - Daya tarik wilayah meningkat.
---	---------------------	--	----------------------------------	---	--

e. PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Tabel 25.

**Matriks Analisis PSRI Penataan Administrasi Kependudukan
Kabupaten Boalemo**

N o	Indikator	Pressure	State	Respond	Impact
1	Cakupan Akta Kelahiran Balita	- Kesadaran orang tua masih rendah - Pemahaman pentingnya dokumen legal belum merata.	Kepemilikan akta kelahiran 2024 = 98,59%.	- Pelibatan aparat desa & RT/RW - Pemanfaatan data sekolah untuk identifikasi anak tanpa akta.	Cakupan akta kelahiran mencapai 99,89%.
2	Cakupan Akta Cerai	- Rendahnya kesadaran pencatatan pascaputus	Kepemilikan akta	- Pendataan baseline putusan cerai	Cakupan akta cerai meningkat

KABAG HUKUM	DINASISTEM KANTOR	ASB	SEKDA	WABUP

		an pengadilan - Proses administrasi belum sepenuhnya mudah.	cerai 2024 = 77%.	- Monitoring rutin setiap triwulan. -	menjadi 88,19%.
3	Cakupan Akta Nikah	- Kesadaran pencatatan nikah rendah, terutama pada perkawinan siri/adat - Layanan KUA-Dukcapil belum merata. -	Kepemilikan akta nikah 2024 = 57,68%.	- Edukasi manfaat akta nikah - Layanan isbat nikah kolektif - Layanan pencatatan nikah di tempat. -	Cakupan akta nikah meningkat menjadi 72,22%.
4	Cakupan Akta Kematian	- Persepsi bahwa akta kematian tidak mendesak - Kurangnya literasi manfaat akta kematian.	Kepemilikan akta kematian 2024 = 100%.	Integrasi laporan kematian dengan fasilitas kesehatan & desa.	Validitas data kependudukan semakin akurat.

F. Isu Strategis Pembangunan Kependudukan

Isu strategis Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Boalemo diambil dari **Isu Strategis RPJMD Kabupaten Boalemo 2025-2029** yang berkaitan dengan dinamika kependudukan, kualitas SDM, ketahanan keluarga, penataan mobilitas, dan administrasi kependudukan.

Isu-isu tersebut mencerminkan tantangan utama yang perlu ditangani untuk mewujudkan visi daerah “*Terwujudnya Kabupaten Boalemo yang Produktif dan Berdaya Saing Tahun 2030.*”

Isu strategis tersebut dirangkum sebagai berikut:

1. **Pengendalian Kuantitas Penduduk**

- a. Angka kelahiran masih relatif tinggi.
- b. Perkawinan usia anak masih terjadi, khususnya pada remaja perempuan usia 15–19 tahun.
- c. Akses layanan KB dan kesehatan reproduksi belum merata, terutama di wilayah perdesaan seperti Paguyaman Pantai, Dulupi, dan Wonosari.
- d. Unmet need keluarga berencana masih hadir meskipun cakupan KB cukup tinggi

2. **Peningkatan Kualitas Penduduk**

- a. Kualitas pendidikan masih rendah, tercermin dari Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Boalemo yang hanya mencapai 7,31 tahun.
- b. Angka stunting masih tinggi, berada pada 8%, di atas target nasional.
- c. Kualitas kesehatan penduduk belum optimal, termasuk AKB (23–26 kasus/tahun) dan AKI (2–3 kasus).
- d. Produktivitas tenaga kerja masih terbatas, ditunjukkan oleh tingginya pekerja informal (±65%) dan rendahnya pekerja bersertifikat keahlian.
- e. Kesenjangan gender dalam partisipasi kerja perempuan masih signifikan.

3. **Pembangunan Keluarga**

- a. Ketahanan keluarga belum optimal, tercermin dari nilai Indeks Pembangunan Keluarga (I-Bangga).
- b. Pengasuhan remaja dan perlindungan anak perlu diperkuat, termasuk kasus kekerasan pada anak dan rendahnya keterlibatan keluarga dalam pengasuhan positif.
- c. Akses layanan bimbingan keluarga dan dukungan sosial belum merata, khususnya di desa-desa terpencil.
- d. Rendahnya literasi keuangan dan perencanaan keluarga, berdampak pada kerentanan ekonomi rumah tangga.

4. **Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk**

- a. Persebaran penduduk yang tidak merata, dengan konsentrasi penduduk terbesar di Tilamuta, Paguyaman, dan Wonosari.

KATAC HUPUM	DINASISDA KANTOR	ASS	SEKOA	WABUP
				

- b. Wilayah pesisir dan pedalaman mengalami kepadatan rendah, berpengaruh pada efisiensi layanan publik.
- c. Migrasi netto bernilai negatif, menunjukkan keluarnya penduduk usia produktif ke daerah lain karena keterbatasan lapangan kerja.
- d. Infrastruktur dasar belum merata, terutama sanitasi aman dan air bersih di wilayah tertentu.

5. **Penataan Administrasi Kependudukan**

- a. Kesadaran masyarakat terhadap registrasi vital masih perlu ditingkatkan, terutama terkait akta cerai, akta kematian, dan pembaruan Kartu Keluarga.
- b. Akses masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan masih terbatas di kecamatan yang jauh dari pusat layanan .
- c. Pemanfaatan sistem informasi kependudukan belum optimal, sehingga integrasi data desa-kecamatan-kabupaten belum sepenuhnya berjalan.
- d. Pencatatan peristiwa kependudukan belum real-time, menyebabkan keterlambatan pemutakhiran data dan perencanaan program.
- e. Banyak perkawinan yang belum tercatat – Solusi: Isban Nikah melalui Pengadilan Agama.
- f. Printer Pencetak Kartu Identitas Anak (KIA) dan Tintanya.

KABUPATEN HUKUM	UNAB/SEKDA KANTOR	ASE	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BAB II
SASARAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

A. Arah Kebijakan, Strategi dan Target Pengelolaan Kuantitas Penduduk

1. Arah Kebijakan
- Penguatan efektivitas program pengelolaan jumlah penduduk melalui layanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, inklusif, dan terjangkau.
2. Strategi
- Edukasi kesehatan reproduksi remaja dan penundaan usia kawin pertama.
 - Pengurangan biaya pengasuhan dan pendidikan anak melalui program perlindungan sosial.
 - Sosialisasi program KB berbasis budaya lokal.
3. Target 2025–2029

No	Tujuan Strategis	Indikator	Baseline 2024	Sumber Data	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	Mengarahkan laju pertumbuhan penduduk agar seimbang	Total Fertility Rate (TFR)	2,20	BKKBN	2,15	2,12	2,10	2,08	2,05
		ASFR 15–19 tahun	23.6	BKKBN	22.80	22.50	22.20	22.05	22.0
		Kebutuhan KB Terpenuhi	77.00	BKKBN	77.24	77.85	78.40	78.65	78.91

B. Arah Kebijakan, Strategi dan Target Peningkatan Kualitas Penduduk

1. Arah Kebijakan
- Transformasi sistem pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan untuk mengoptimalkan bonus demografi.
2. Strategi
- Pemerataan akses pendidikan dasar dan menengah.
 - Keselarasan pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja.
 - Penurunan stunting melalui intervensi kesehatan dan sanitasi.

KABAG. MUMULUR	DINASRAKAB. SANTOS	ASS	SERDA	WABUP

- Penguatan perlindungan sosial.

3. Target 2025–2029

No	Tujuan Strategis	Indikator	Baseline 2024	Sumber Data	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	Pembangunan manusia inklusif dan bermutu pada aspek Pendidikan dan Kesehatan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,31 tahun	BPS	7,45	7,48	7,51	7,58	7,65
		APK Pendidikan Tinggi	21.74	Dinas Pendidikan	24.24	26.74	29.24	31.74	34.24
		Penduduk Bersertifikat Keahlian	0 Orang	Distrans Naker	30	40	50	60	70
		Stunting	8%	Dinas Kesehatan	7,9%	7,8%	7,7%	7,6%	7,5%
		AKB (Angka Kematian Bayi)	27.32 kasus	Dinkes	25	24	23	22	22
		Angka Kematian Ibu (AKI)	4–6 kasus	Dinkes	2	2	2	2	2
2	Menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial melalui perluasan kesempatan ekonomi, pekerjaan dan perlindungan sosial yang inklusif	Tingkat Kemiskinan	17,83%	BPS	17,69	17,60	17,21	16,82	16,53
		TPKW (Partisipasi Kerja Wanita)	54,18%	Distrans Naker	54,28	54,38	54,48	54,58	54,68
		Pekerja Informal	64.67%	BPS	61.67	58.67	55.67	52.67	49.67
		Pekerja Disabilitas Formal	29,70	Distrans Naker	31,31	32,93	34,54	36,15	37,76
		Gini Ratio	0.400	BPS	0.395	0.390	0.385	0.380	0.375
		PDRB Per Kapita (ADHB)	43.522,98	BPS	44.973,20	46.423,43	47.873,65	49.323,87	50.774,09
		TPT (Pengangguran Terbuka)	3,06%	BPS	3,00	2,75	2,25	2,00	1,6

KABDAO HUKUM	DINAS KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

C. Arah Kebijakan, Strategi dan Target Pembangunan

Keluarga

1. Arah Kebijakan

Penguatan ketahanan dan fungsi keluarga sebagai fondasi SDM berkualitas.

2. Strategi

- Edukasi pranikah, literasi keuangan, dan konseling keluarga.
- Sinergi pemerintah-masyarakat dalam kebijakan ramah keluarga.
- Penguatan pengasuhan anak dan ketahanan psikososial keluarga.

3. Target 2025–2029

No	Tujuan Strategis	Indikator	Baseline 2024	Sumber Data	2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatkan kualitas keluarga yang aman, nyaman, harmonis, sejahtera dan bahagia	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	59,73	Dinas PPKBP3A , BKKBN	60,05	60,20	60,50	61,00	61,20
		Indeks Perlindungan Anak	NA	Dinas PPKBP3A , Dinas Sosial	55	56	57	58	59
		Akses Rumah Tangga terhadap Air Bersih	93,37 %	Dinas PUPR, BPS	91,10	92,90	94,60	95,80	97,00
		Sanitasi Aman	84,28	Dinas PUPR	86.90%	89.50 %	92.10 %	94.80%	100%
		Indeks Lansia Berdaya	57.6	Dinas PPKBP3A	58.10	58.60	59.10	59.60	60.10
		Indeks Pengasuhan Remaja	83.1	Dinas PPKBP3A	84.70	86.10	87.40	88.50	89.60
		Kepesertaan JKN/BPJS	97,16	Dinkes, Dinsos	97,39	97,62	97,85	98,08	98,31

KABUPATEN BOALEMO	DINAS KEMASYARAKATAN	ASD	SEKDA	WABUP

D. Arah Kebijakan, Strategi dan Target Penataan Pesebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

- 1. Arah Kebijakan
Pemerataan pembangunan dan tata ruang berkelanjutan.
- 2. Strategi
 - Revitalisasi perdesaan melalui layanan dasar dan ekonomi lokal.
 - Penataan ruang perkotaan adaptif dan berkelanjutan.
- 3. Target 2025–2029

No	Tujuan Strategis	Indikator	Baseline 2024	Sumber	2025	2026	2027	2028	2029
1	Distribusi penduduk seimbang	Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) Mandiri	56.6	Dinas PPKBP3A	56.6	57.2	57.9	58.5	59.1
		Rate Nett Migration (Migrasi Netto)	-2.49	Disdukcapil	- 2,10	- 1.70	- 1.30	- 1.00	- 0.70

E. Arah Kebijakan, Strategi dan Target Penataan Administrasi Data Kependudukan

- 1. Arah Kebijakan
Pengembangan database kependudukan yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses.
- 2. Strategi
 - Pelayanan administrasi kependudukan.
 - Tertib adminduk.
 - Integrasi data kependudukan.
 - Pendayagunaan data lintas sektor.

KABUPATEN BOALEMO	DINAS BERKUALITAS	ASS	SEKDA	WABUP
				

3. Target 2025–2029

No	Tujuan Strategis	Indikator	Baseline 2024 (Boalemo)	Sumber Data	2025	2026	2027	2028	2029
1	Memperluas cakupan administrasi kependudukan	Akta Kelahiran Balita (0–4 tahun)	98,59%	Dukcapil	99.85%	99.86%	99.87%	99.88%	99.89%
		Akta Cerai	77%	Dukcapil	79.14	80.15	81.17	82.18	83.19
		Akta Nikah	60.05%	Dukcapil, KUA	68.21	69.21	70.21	71.22	72.22
		Akta Kematian	94%	Dukcapil	95%	96%	97%	98%	99%

KABAG. HUKUM	DISKOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

BAB II
SASARAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

A. Arah Kebijakan, Strategi dan Target Pengelolaan Kuantitas Penduduk

1. Arah Kebijakan

Penguatan efektivitas program pengelolaan jumlah penduduk melalui layanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, inklusif, dan terjangkau.

2. Strategi

- Edukasi kesehatan reproduksi remaja dan penundaan usia kawin pertama.
- Pengurangan biaya pengasuhan dan pendidikan anak melalui program perlindungan sosial.
- Sosialisasi program KB berbasis budaya lokal.

3. Target 2025–2029

No	Tujuan Strategis	Indikator	Baseline 2024	Sumber Data	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	Mengarahkan laju pertumbuhan penduduk agar seimbang	Total Fertility Rate (TFR)	2,20	BKKBN	2,15	2,12	2,10	2,08	2,05
		ASFR 15–19 tahun	23.6	BKKBN	22.80	22.50	22.20	22.05	22.0
		Kebutuhan KB Terpenuhi	77.00	BKKBN	77.24	77.85	78.40	78.65	78.91

B. Arah Kebijakan, Strategi dan Target Peningkatan Kualitas Penduduk

1. Arah Kebijakan

Transformasi sistem pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan untuk mengoptimalkan bonus demografi.

2. Strategi

- Pemerataan akses pendidikan dasar dan menengah.
- Keselarasan pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja.
- Penurunan stunting melalui intervensi kesehatan dan sanitasi.
- Penguatan perlindungan sosial.

KABAG HUKUM	DINASISDAK KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

3. Target 2025–2029

No	Tujuan Strategis	Indikator	Baseline 2024	Sumber Data	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	Pembangunan manusia inklusif dan bermutu pada aspek Pendidikan dan Kesehatan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,31 tahun	BPS	7,45	7,48	7,51	7,58	7,65
		APK Pendidikan Tinggi	21.74	Dinas Pendidikan	24.24	26.74	29.24	31.74	34.24
		Penduduk Bersertifikat Keahlian	0 Orang	Distrans Naker	30	40	50	60	70
		Stunting	8%	Dinas Kesehatan	7,9%	7,8%	7,7%	7,6%	7,5%
		AKB (Angka Kematian Bayi)	27.32 kasus	Dinkes	25	24	23	22	22
		Angka Kematian Ibu (AKI)	4–6 kasus	Dinkes	2	2	2	2	2
2	Menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial melalui perluasan kesempatan ekonomi, pekerjaan dan perlindungan sosial yang inklusif	Tingkat Kemiskinan	17,83%	BPS	17,69	17,60	17,21	16,82	16,53
		TPKW (Partisipasi Kerja Wanita)	54,18%	Distrans Naker	54,28	54,38	54,48	54,58	54,68
		Pekerja Informal	64.67%	BPS	61.67	58.67	55.67	52.67	49.67
		Pekerja Disabilitas Formal	29,70	Distrans Naker	31,31	32,93	34,54	36,15	37,76
		Gini Ratio	0.400	BPS	0.395	0.390	0.385	0.380	0.375
		PDRB Per Kapita (ADHB)	43.522,98	BPS	44.973,20	46.423,43	47.873,65	49.323,87	50.774,09
		TPT (Pengangguran Terbuka)	3,06%	BPS	3,00	2,75	2,25	2,00	1,6

KABAG HUKUM	DINASADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

C. Arah Kebijakan, Strategi dan Target Pembangunan
Keluarga

1. Arah Kebijakan

Penguatan ketahanan dan fungsi keluarga sebagai fondasi SDM berkualitas.

2. Strategi

- Edukasi pranikah, literasi keuangan, dan konseling keluarga.
- Sinergi pemerintah-masyarakat dalam kebijakan ramah keluarga.
- Penguatan pengasuhan anak dan ketahanan psikososial keluarga.

3. Target 2025–2029

No	Tujuan Strategis	Indikator	Baseline 2024	Sumber Data	2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatkan kualitas keluarga yang aman, nyaman, harmonis, sejahtera dan bahagia	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	59,73	Dinas PPKBP3A, BKKBN	60,05	60,20	60,50	61,00	61,20
		Indeks Perlindungan Anak	NA	Dinas PPKBP3A, Dinas Sosial	55	56	57	58	59
		Akses Rumah Tangga terhadap Air Bersih	93,37 %	Dinas PUPR, BPS	91,10	92,90	94,60	95,80	97,00
		Sanitasi Aman	84,28	Dinas PUPR	86.90%	89.50 %	92.10 %	94.80%	100%
		Indeks Lansia Berdaya	57.6	Dinas PPKBP3A	58.10	58.60	59.10	59.60	60.10
		Indeks Pengasuhan Remaja	83.1	Dinas PPKBP3A	84.70	86.10	87.40	88.50	89.60
		Kepesertaan JKN/BPJS	97,16	Dinkes, Dinsos	97,39	97,62	97,85	98,08	98,31

KABAG HUKUM	DINASISDAS KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

D. Arah Kebijakan, Strategi dan Target Penataan Pesebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

- 1. Arah Kebijakan
Pemerataan pembangunan dan tata ruang berkelanjutan.
- 2. Strategi
 - Revitalisasi perdesaan melalui layanan dasar dan ekonomi lokal.
 - Penataan ruang perkotaan adaptif dan berkelanjutan.
- 3. Target 2025–2029

No	Tujuan Strategis	Indikator	Baseline 2024	Sumber	2025	2026	2027	2028	2029
1	Distribusi penduduk seimbang	Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) Mandiri	56.6	Dinas PPKBP3A	56.6	57.2	57.9	58.5	59.1
		Rate Nett Migration (Migrasi Netto)	-2.49	Disdukcapil	- 2,10	- 1.70	- 1.30	- 1.00	- 0.70

E. Arah Kebijakan, Strategi dan Target Penataan Administrasi Data Kependudukan

- 1. Arah Kebijakan
Pengembangan database kependudukan yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses.
- 2. Strategi
 - Pelayanan administrasi kependudukan.
 - Tertib adminduk.
 - Integrasi data kependudukan.
 - Pendayagunaan data lintas sektor.

KADISAG HUKUM	DISKUSI KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

3. Target 2025–2029

No	Tujuan Strategis	Indikator	Baseline 2024 (Boalemo)	Sumber Data	2025	2026	2027	2028	2029
1	Memperluas cakupan administrasi kependudukan	Akta Kelahiran Balita (0–4 tahun)	98,59%	Dukcapil	99.85%	99.86%	99.87%	99.88%	99.89%
		Akta Cerai	77%	Dukcapil	79.14	80.15	81.17	82.18	83.19
		Akta Nikah	60.05%	Dukcapil, KUA	68.21	69.21	70.21	71.22	72.22
		Akta Kematian	94%	Dukcapil	95%	96%	97%	98%	99%

KAB. BOALEMO	DISKOR	AS	SEKDA	WABUP
				

BAB III

RENCANA AKSI

A. Tata Kelola Pembangunan Kependudukan

Tata kelola pembangunan kependudukan menjadi landasan penting yang memastikan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Boalemo dapat bekerja secara terpadu dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi program-program kependudukan. Melalui pengelolaan yang sistematis dan terarah, setiap aktivitas pembangunan penduduk diharapkan memberikan dampak yang nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah ini.

Prinsip utama tata kelola tersebut adalah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antarberbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, perangkat daerah, lembaga kemasyarakatan, hingga sektor dunia usaha. Seluruh pihak diharapkan mampu berkolaborasi untuk memastikan bahwa kebijakan kependudukan berjalan efektif dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Untuk mewujudkan tata kelola yang solid dan terkoordinasi, Pemerintah Kabupaten Boalemo membentuk **Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kependudukan (TK-P2K)**. Tim ini berperan sebagai wadah utama dalam menggerakkan kolaborasi lintas sektor, merumuskan langkah teknis, serta menyelaraskan berbagai program agar tujuan pembangunan kependudukan dapat tercapai secara optimal.

1. Struktur Kelembagaan

Struktur kelembagaan TK-P2K terdiri dari:

- **Pengarah** : Bupati Boalemo
- **Ketua** : Sekretaris Daerah
- **Wakil Ketua** : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- **Sekretaris** : Kepala Dinas P3APPKB
- **Anggota** : Kepala Perangkat Daerah terkait (Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Disdukcapil, Dinas PUPR, Disnakertrans, Bappeda-Litbang, Camat, dan lembaga vertikal terkait)

KABAG HUKUM	DINAS DAERAH KABUPATEN	ASS	SEKDA	WABUP
				

2. Tugas Tim Koordinasi

Tugas Tim Koordinasi adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan teknis pembangunan kependudukan.
- b. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan lintas sektor.
- c. Menyusun rencana aksi tahunan pembangunan kependudukan.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian indikator pembangunan kependudukan.
- e. Melaporkan capaian pembangunan kependudukan kepada Bupati Boalemo setiap tahun.

3. Kelompok Kerja (Pokja)

Tim Koordinasi dibantu oleh Pokja tematik yang meliputi:

- Pokja Pengelolaan Kuantitas Penduduk
- Pokja Peningkatan Kualitas Penduduk
- Pokja Pembangunan Keluarga
- Pokja Persebaran dan Pengarahan Mobilitas
- Pokja Administrasi Kependudukan

Setiap Pokja bertanggung jawab menyusun rencana aksi sektoral dan melaksanakan pemantauan terhadap indikator masing-masing bidang.

B. Rencana Aksi Tahun 2025-2029

Rencana Aksi merupakan terjemahan operasional dari arah kebijakan, strategi, dan sasaran yang telah dirumuskan dalam Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Boalemo. Rencana Aksi memuat program, kegiatan, indikator, target tahunan, serta instansi penanggung jawab.

1. Pengelolaan Kuantitas Penduduk

Rencana Aksi bidang ini mencakup:

- Peningkatan akses layanan KB dan kesehatan reproduksi.
- Penurunan angka perkawinan usia anak.
- Peningkatan cakupan MKJP dan layanan pascapersalinan.
- Penguatan edukasi kesehatan reproduksi remaja.

2. Peningkatan Kualitas Penduduk

Rencana Aksi meliputi:

- Penurunan stunting melalui intervensi 1000 HPK.
- Peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah.
- Perluasan pelatihan vokasi dan sertifikasi tenaga kerja.
- Penguatan layanan kesehatan ibu dan anak.

KABUPATEN BOALEMO	DINAS/BAKOR KANTOR	AS	SEKDA	WABUP

- Pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan.

3. Pembangunan Keluarga

Rencana Aksi meliputi:

- Penguatan ketahanan keluarga melalui konseling keluarga.
- Penguatan pengasuhan remaja dan perlindungan anak.
- Pengembangan kampung keluarga berkualitas.
- Peningkatan akses lansia terhadap layanan kesehatan dan sosial.

4. Penataan Persebaran & Mobilitas Penduduk

Rencana Aksi meliputi:

- Pemerataan pembangunan wilayah.
- Optimalisasi fasilitas dasar desa.
- Pengembangan ekonomi lokal untuk mengurangi migrasi keluar.
- Penataan ruang dan penyediaan layanan publik berbasis pemerataan.

5. Administrasi Kependudukan

Rencana Aksi meliputi:

- Peningkatan cakupan akta kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian.
- Penguatan integrasi data kependudukan (SIAK terpusat).
- Layanan jemput bola adminduk di desa-desa terpencil.
- Penertiban data kependudukan dan pemutakhiran tahunan.

C. Kerangka Kelembagaan Pembangunan Kependudukan

Kerangka kelembagaan menggambarkan peran perangkat daerah dalam pembangunan kependudukan:

1. Dinas PPPKB3A

- Koordinasi lintas sektor pembangunan kependudukan.
- Pelaksanaan program KB, PKBR, Genre, dan ketahanan keluarga.
- Monitoring Kampung KB.

2. Dinas Kesehatan

- Penurunan AKI, AKB, dan stunting.
- Pelayanan persalinan, gizi ibu-anak, imunisasi balita.
- Pengembangan Posyandu.

3. Dinas Pendidikan

- Pemerataan akses PAUD, SD, SMP, dan SMA.
- Peningkatan mutu pembelajaran.
- Penanganan anak putus sekolah.

4. Dinas Sosial dan PMD

- Pengurangan kemiskinan.
- Perlindungan anak dan lanjut usia.

KABAG HUMAS	DINASEKOR KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

- Bantuan sosial tepat sasaran.
- 5. Distrans Naker
 - Pelatihan vokasi dan sertifikasi.
 - Penempatan kerja dan Pemberdayaan Wirausaha Baru.
- 6. Dinas Kumperindag
 - Pemberdayaan UMKM
- 7. Dinas PUPR
 - Penyediaan infrastruktur dasar (air bersih, sanitasi, jalan).
- 8. Disdukcapil
 - Penertiban administrasi kependudukan.
 - Pemutakhiran data secara berkala.
 - Layanan adminduk berbasis digital dan jemput bola.
- 9. BAPPPEDA
 - Perencanaan, integrasi program, dan evaluasi lintas sektor.

D. Koordinasi dan Penguatan Kelembagaan

Penguatan kelembagaan dilakukan melalui:

1. Pengembangan sistem koordinasi lintas sektor melalui rapat triwulan tk-p2k.
2. Penyusunan rencana aksi tahunan berbasis indikator dan target rpjmd.
3. Monitoring dan evaluasi berbasis data kependudukan terintegrasi.
4. Kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga masyarakat, dan dunia usaha.
5. Penguatan kapasitas perangkat daerah melalui pendidikan dan pelat

KABAG HUKUM	DINASRADA KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

Tabel 26

Rencana Aksi Pengembangan Kependudukan Kabupaten Boalemo
Tahun 2025-2029

No	Indikator	Baseline 2023– 2024	Sumber Data	Target					Dinas Pengampu	Dinas Terkait	Program	Kegiatan
				2025	2026	2027	2028	2029				
A.	PENGELOLAAN KUANTITAS PENDUDUK											
1	TFR (Total Fertility Rate)	2,19	BKKBN Gorontalo/ BPS	2,15	2,12	2,10	2,08	2,05	Dinas Kesehatan & Dinas PPKBP3A	BKKBN, Puskesmas	Pengendalian Penduduk; Pembinaan KB	Distribusi Alokon, Faskes KB, Pelayanan MKJP, Monev Pasca Salin
2	ASFR 15-19 tahun	23.16	BKKBN/ BPS	22.80	22.50	22.20	22.05	22.0	Dinas PPKBP3A	Dinas Pendidikan, Kemnag	Pengendalian Penduduk	Penguatan PIK-R, Edukasi sekolah, KIE remaja, Monev ASFR
3	Kebutuhan KB Terpenuhi	77.00	BKKBN	77.24	77.85	78.40	78.65	78.91	Dinas PPKBP3A	Puskesmas, RS	Pembinaan KB	Layanan KB merata, Jejaring Faskes, KIE KB, Peningkatan MKJP

No	Indikator	Baseline 2023- 2024	Sumber Data	Target					Dinas Pengampu	Dinas Terkait	Program	Kegiatan
				2025	2026	2027	2028	2029				
B. PENINGKATAN KUALITAS PENDUDUK												
4	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,31 tahun	BPS	7,45	7,48	7,51	7,58	7,65	Dinas Pendidikan	BAPPEDA, Desa	Pemerataan layanan pendidikan	Rehabilitasi sekolah, pengadaan sarpras, beasiswa miskin
5	APK Pendidikan Tinggi	21.74	Dinas Pendidikan	24.24	26.74	29.24	31.74	34.24	Dinas Pendidikan	Perguruan Tinggi	Pendidikan Tinggi	Beasiswa kurang mampu, sosialisasi kuliah
6	Penduduk Bersertifikat Keahlian	0 Orang	Dinstrans Naker	30	40	50	60	70	Dinstrans Naker	BLK	Pelatihan Kerja	Sertifikasi kompetensi, vokasi, pemagangan
7	Stunting	8%	Dinas Kesehatan	7,9%	7,8%	7,7%	7,6%	7,5%	Dinas Kesehatan	BAPPEDA, Dinas PPKBP3A, Dinsos	Percepatan Penurunan Stunting	Intervensi 1000 HPK; Posyandu; Gizi; ASI Eksklusif

KABUPATEN BOALEMO	DINAS KANTOR	ASIS	SEKDA	WAKIL
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

No	Indikator	Baseline 2023– 2024	Sumber Data	Target					Dinas Pengampu	Dinas Terkait	Program	Kegiatan
				2025	2026	2027	2028	2029				
8	AKB (Angka Kematian Bayi)	27.32 kasus	Dinkes	25	24	23	22	22	Dinkes	RSUD	Pelayanan Kesehatan Ibu Anak	Neonatal emergensi, perlengkapan NICU
9	Angka Kematian Ibu (AKI)	4–6 kasus	Dinkes	2	2	2	2	2	Dinkes	Puskesmas, RS	Pelayanan KIA	ANC lengkap, P4K, kelas bumil, RTK
10	Tingkat Kemiskinan	17,83%	BPS	17,69	17,60	17,21	16,82	16,53	Dinsos	Bappedda, Desa	Perlindungan Sosial	Bansos tepat sasaran, pemberdayaan ekonomi
11	TPKW (Partisipasi Kerja Wanita)	54,18%	Dinstrans Naker	54,28	54,38	54,48	54,58	54,68	Dinstrans Naker	UMKM, Desa	Vokasi Perempuan	Pelatihan UMKM, PEKKA
12	Pekerja Informal	64.67%	BPS	61.67	58.67	55.67	52.67	49.67	Distrans Naker	UMKM	Penempatan Kerja	NIB UMKM, vokasi informal
13	Pekerja Disabilitas Formal	29,70	Dinstrans Naker	31,31	32,93	34,54	36,15	37,76	Dinsos	Dinstrans Naker	Pelatihan Inklusif	Wirausaha Disabilitas
14	Gini Ratio	0.400	BPS	0.395	0.390	0.385	0.380	0.375	Bappedda	Dinsos	Pengurangan Ketimpangan	UMKM, subsidi pendidikan

KABAG HUMAN	UMKRAK KANTOR	ASS	SEKDA	WAGUB
1	2	3	4	5

No	Indikator	Baseline 2023- 2024	Sumber Data	Target					Dinas Pengampu	Dinas Terkait	Program	Kegiatan
				2025	2026	2027	2028	2029				
15	PDRB Per Kapita (ADHB)	43.522,98	BPS	44.973 ,20	46.423 ,43	47.873 ,65	49.323 ,87	50.774 ,09	Bappeda	Kumperidang, Pertanian, Kelautan	Ekonomi Daerah	Industri mikro, ekspor daerah
16	TPT (Pengangguran Terbuka)	3.06	BPS	3,00	2,75	2,25	2,00	1,6	Distransnaker	UMKM, Industri	Penempatan Kerja	Vokasi pasar kerja, magang industri
C. PEMBANGUNAN KELUARGA												
17	I-Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	59,73	Dinas PPKB3A, BKKB	60,05	60,20	60,50	61,00	61,20	Dinas PPKB3A	Dinas Sosial, Dinas Pendidikan	Penguatan Ketahanan Keluarga	Konseling keluarga, BKR, BKL, PKBR
18	Indeks Perlindungan Anak	NA	Dinas PPKB3A, Dinas Sosial	55	56	57	58	59	Dinas PPKB3A	Dinas PPKB3A, Dinkes, Desa	Perlindungan Anak Terpadu	Pencegahan kekerasan, edukasi parenting
19	Akses Rumah Tangga terhadap Air Bersih	93,37%	Dinas PUPR, BPS	91,10	92,90	94,60	95,80	97,00	Dinas PUPR	Desa, Bappeda	Infrastruktur Air Bersih	SPAM desa, penyediaan sarana air bersih

KABUPATEN BOALEMO	DINAS KEMENTERIAN	ASSTEN	SEKDA	KABUPATEN

No	Indikator	Baseline 2023- 2024	Sumber Data	Target					Dinas Pengampu	Dinas Terkait	Program	Kegiatan
				2025	2026	2027	2028	2029				
20	Sanitasi Aman	84,28	Dinas PUPR	86.90%	89.50%	92.10%	94.80%	100%	Dinas PUPR	Dinkes, Desa	Sanitasi Lingkungan	IPLT, edukasi sanitasi, pengolahan limbah
21	Indeks Lansia Berdaya	57.6	Dinas PPPKB3A	58.10	58.60	59.10	59.60	60.10	Dinas Sosial	Puskesmas, Desa	Layanan Lansia	Posyandu lansia, home care, dukungan sosial
22	Indeks Pengasuhan Remaja	83.1	Dinas PPKBP3A	84.70	86.10	87.40	88.50	89.60	Dinas PPKBP3A	Sekolah, Puskesmas	Pengasuhan Remaja	Pendidikan pengasuhan, BKR, program Genre
23	Kepesertaan JKN/BPJS	97,16	Dinkes, Dinsos	97,39	97,62	97,85	98,08	98,31	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial, Desa	Perlindungan Jaminan Kesehatan	Verifikasi DTKS, perluasan BPJS KIS
D.	PENATAAN PERSEBARAN & MOBILITAS											
24	Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) Mandiri	56.0	Dinas PPKBP3A	56.6	57.2	57.9	58.5	59.1	Dinas PPKBP3A	Desa, Bappeda, Dinas Sosial	Penguatan Keluarga & KB	Penguatan kelembagaan Kampung KB, pendampingan keluarga rentan, integrasi program desa

No	Indikator	Baseline 2023- 2024	Sumber Data	Target					Dinas Pengampu	Dinas Terkait	Program	Kegiatan
				2025	2026	2027	2028	2029				
25	Rate Nett Migration (Migrasi Netto)	-2.49	BPS, Disdukcapil	-2,10	-1.70	-1.30	-1.00	-0.70	Disdukcapil	Disnaker, Bappedda, Desa	Penataan Persebaran Penduduk	Pengembangan ekonomi desa, UMKM, wirausaha muda, pelayanan kependudukan mobile
E.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN											
26	Akta Kelahiran Balita	98.59%	Dukcapil, BPS	99.85	99.86	99.87	99.88	99.89	Dukcapil	Desa, Puskesmas	Administrasi Kependudukan	Integrasi layanan, edukasi dan sosialisasi di Desa dan Sekolah
27	Akta Cerai	77%	Dukcapil	79.14	80.15	81.17	82.18	83.19	Dukcapil	Pengadilan Agama	Administrasi Kependudukan	Sosialisasi prosedur cerai; Pelayanan dokumen via aplikasi

KABAG HUKUM	DINAS KEMAS	ASIS	SEKDA	WABUP
	2	1	1	1

No	Indikator	Baseline 2023- 2024	Sumber Data	Target					Dinas Pengampu	Dinas Terkait	Program	Kegiatan
				2025	2026	2027	2028	2029				
28	Akta Nikah	60.05%	Dukcapil, KUA	68.21	69.21	70.21	71.22	72.22	Dukcapil & KUA	Desa, Dinas PPKBP3A	Administrasi Kependudukan	Pendataan terintegrasi KUA; Pelayanan pencatatan nikah ditempat
29	Akta Kematian	94%	Dukcapil	95%	96%	97%	98%	99%	Dukcapil	Desa	Administrasi Kependudukan	Pelayanan akta kematian di desa /kelurahan; Integrasi laporan kematian dengan puskesmas & RS; Sistem pelaporan cepat (real-time); Pendataan kematian rutin

KABAG PALU	DINAS KEMAS	ASS	SEKDA	KWABUP
				

BAB IV

PENUTUP

A. Pemantauan

Pemantauan dilakukan secara berkala dengan tujuan memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan dalam PJPK berjalan sesuai rencana, memenuhi target kinerja, serta memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Proses pemantauan dilaksanakan secara sistematis melalui pengumpulan data capaian indikator, telaah perkembangan kegiatan, serta identifikasi kendala di lapangan yang dilakukan oleh setiap perangkat daerah secara periodik, minimal setiap triwulan.

Teknik pemantauan mencakup: (1) pengisian instrumen pemantauan berbasis indikator PJPK; (2) verifikasi data melalui koordinasi lintas perangkat daerah; (3) kunjungan lapangan pada lokasi kegiatan prioritas; dan (4) analisis capaian terhadap target tahunan. Hasil pemantauan digunakan untuk mengidentifikasi hambatan, menentukan langkah korektif, memperbaiki pelaksanaan program, serta memastikan bahwa target tahunan dapat dicapai secara tepat waktu dan berkelanjutan.

B. Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai sejauh mana program dan kegiatan dalam PJPK telah mencapai target yang ditetapkan, memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas kebijakan, serta memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal. Evaluasi juga menjadi dasar penting dalam merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan dan perencanaan pembangunan kependudukan di tahun-tahun berikutnya.

Proses evaluasi dilakukan secara bertahap dan berjenjang, mencakup evaluasi tahunan dan evaluasi akhir periode. Evaluasi tahunan disusun berdasarkan capaian indikator kinerja program, hasil pemantauan lapangan, serta laporan dari perangkat daerah yang bertanggung jawab. Evaluasi akhir periode dilakukan secara komprehensif untuk menilai keberhasilan implementasi PJPK 2025-2029 secara keseluruhan, mengidentifikasi tantangan, serta menyusun rekomendasi strategis bagi perencanaan kependudukan selanjutnya.

Teknik evaluasi meliputi: (1) pengumpulan dan verifikasi data capaian indikator dari perangkat daerah; (2) analisis kualitatif dan kuantitatif terhadap

KABAG HUKUM	DINASBADM KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

tren capaian; (3) pelaksanaan forum evaluasi lintas sektor; (4) wawancara atau FGD dengan pelaksana dan penerima manfaat; serta (5) penyusunan laporan evaluasi yang memuat temuan utama, pembelajaran, dan rekomendasi kebijakan.

C. Pelaporan

Pelaporan dilakukan dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang lengkap, akurat, dan mutakhir mengenai pelaksanaan program pembangunan kependudukan. Pelaporan berfungsi sebagai dasar bagi pengambilan keputusan strategis, penilaian kinerja tahunan, serta penyusunan perbaikan kebijakan pada periode selanjutnya.

Proses pelaporan dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur. Setiap perangkat daerah wajib menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bappeda-Litbang Kabupaten Boalemo secara periodik, minimal setiap triwulan. Bappeda-Litbang kemudian melakukan kompilasi, analisis, dan verifikasi terhadap seluruh laporan yang diterima sebelum disusun menjadi laporan umum pembangunan kependudukan tahunan.

Teknik pelaporan meliputi: (1) penyusunan laporan berbasis format indikator PJPk yang telah distandardisasi; (2) penggunaan sistem informasi data kependudukan terintegrasi untuk memastikan konsistensi dan akurasi data; (3) pelaporan elektronik melalui aplikasi atau kanal resmi pemerintah daerah; serta (4) penyampaian laporan akhir tahun kepada Bupati Boalemo sebagai dasar evaluasi kinerja dan perumusan kebijakan pembangunan kependudukan berikutnya.

KABAG. HUKUM	DINASBANGSA KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). 2025. Panduan Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025-2029 – Buku 1 PJP. Jakarta: Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). *Data SSGI, AFS, i-BANGGA, dan Data Keluarga* (Berbagai Tahun).
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Boalemo. *Boalemo Dalam Angka* (Berbagai Tahun Terbitan 2020–2024).
- Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo. *Provinsi Gorontalo Dalam Angka* (2024).
- BPS. *Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS)* (2023–2024).
- BPS. *Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)* (2023–2024).
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo. *Data Administrasi Kependudukan* (2023–2024).
- Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo. *Profil Kesehatan Kabupaten Boalemo* (2023–2024).
- Kementerian Kesehatan RI. *Survei Status Gizi Indonesia (SSGI)*.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. *Data Pendidikan (APK, APM, RLS)*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait penyelenggaraan data kependudukan dan perencanaan pembangunan daerah (mengikuti kutipan dokumen).
- Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.
- Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).
- Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2045
- Peraturan Daerah Kabuapten Boalemo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

KABAG MUMUM	DINAS KABUPATEN	ASS	SEKDA	WABUP
				

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo di Provinsi Gorontalo.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

BPJS Kesehatan Kabupaten Boalemo. *Data Kepesertaan JKN* (2024).

KABAG HUKUM	DINASERADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

BUPATI BOALEMO

RUM PAGAU



Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo
2025